



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**DOKUMEN
EVALUASI**

**Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025**



BAPPEDA.KUKARKAB.GO.ID



BAPPEDA.KUTAIKARTANEGARA



BAPPEDA KUTAI KARTANEGARA



BAPPEDA KUTAI KARTANEGARA

DOKUMEN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025



TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya dokumen evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 dapat selesai disusun. Dokumen ini merupakan implementasi dari mandat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Pada surat edaran tersebut memandatkan bahwa evaluasi RPJPD dilakukan pada tahun 2023 ini. Di samping itu, secara eksplisit, surat edaran tersebut juga telah memuat tata cara dalam melaksanakan proses evaluasi dokumen RPJPD pada setiap daerah.

Pada panduan evaluasi yang tertuang dalam surat edaran di atas, penelaahan telah dilakukan pada dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada akhirnya mekanisme evaluasi ditetapkan bahwa evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan pada dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan format pada Permendagri 86/2017. Hal ini masih dinilai wajar, karena pada waktu penyusunan dokumen RPJPD, peraturan tentang RPJPD tersebut masih belum ada. Metode kualitatif yang telah digunakan dalam proses evaluasi ini menekankan pencapaian hasil kinerja RPJPD dapat diukur melalui pengukuran capaian kinerja pada empat periode RPJMD selama waktu 2005 sampai 2025.

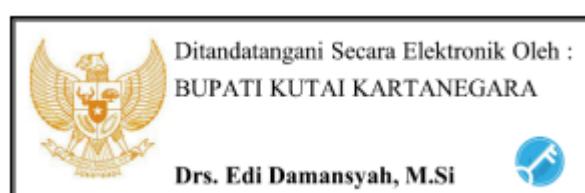
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang ini diharapkan mampu menjadikan media dalam mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan antar

periode waktu pemimpinan daerah setiap lima tahunan. Oleh sebab itu, konsistensi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil evaluasi pada dokumen ini.

Di samping itu, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat pula dijadikan materi dalam komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini difungsikan sebagai alat pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah yang selama ini diambil dari kontribusi masyarakat luas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada akhirnya, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen evaluasi ini, dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2045. Beberapa hasil capaian yang masih kurang maksimal dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kinerja pembangunan pada periode mendatang. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam proses evaluasi ini.

Kutai Kartanegara, Juni 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	x
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SKEMA PELAKSANAAN EVALUASI.....	5
1.5 WAKTU PELAKSANAAN	7
1.6 TIM PENYUSUN.....	7
BAB II	8
2.1 GAMBARAN UMUM RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025	8
2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH KUTAI KARTANEGARA	32
2.3 EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SETIAP PERIODE LIMA TAHUNAN.....	39
2.3.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE I (TAHUN 2005-2010).....	39
2.3.2 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE II (TAHUN 2011-2015).....	41
2.3.3 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE III (TAHUN 2016-2021)	45
2.3.4 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE IV (TAHUN 2021-2026).....	47
2.4 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA SETIAP MISI	49
2.4.1 CAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)	52
2.4.2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)	54
2.4.3 CAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA).....	56
2.5 EVALUASI CAPAIAN VISI RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2005-2025	59
2.5.1 TRANSFORMASI EKONOMI.....	63
2.6 PREDIKAT KINERJA RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025	68
BAB III	72
3.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA.....	72
3.1.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)	72
3.1.2 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)	75

3.1.3 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA)	78
3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	81
3.2.1 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)	82
3.2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)	85
3.2.3 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA)	88
BAB IV.....	91
4.1 KESIMPULAN.....	91
4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT.....	97
LAMPIRAN.....	104
LAMPIRAN I.....	105
LAMPIRAN II.....	107
LAMPIRAN III.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar i. 1 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023	xi
Gambar i. 2 Grafik Capaian Kinerja Pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	xii
Gambar i. 3 Kinerja Periodik RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	xiv
Gambar 2. 1 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode I Tahun 2005-2010	44
Gambar 2. 2 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode II Tahun 2011-2015	46
Gambar 2. 3 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode III	49
Gambar 2. 4 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode IV Tahun 2021-2026	52
Gambar 2. 5 Ketercapaian Misi Ke-1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	57
Gambar 2. 6 Ketercapaian Misi Ke- 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	60
Gambar 2. 7 Ketercapaian Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	62
Gambar 2. 8 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara	66
Gambar 2. 9 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023	71
Gambar 2. 10 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	72
Gambar 2. 11 Kinerja Pembangunan Jangka Panjang pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Tahun 2005-2025	73

DAFTAR TABEL

Tabel i. 1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	x
Tabel i. 2 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	xi
Tabel i. 3 Capaian Kinerja pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	xiii
Tabel 2. 1 Pokok-Pokok Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025	17
Tabel 2. 2 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	22
Tabel 2. 3 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	26
Tabel 2. 4 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	28
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	38
Tabel 2. 6 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode I Tahun 2005-2010	43
Tabel 2. 7 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode II Tahun 2011-2015	46
Tabel 2. 8 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode III Tahun 2016-2021	48
Tabel 2. 9 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode IV Tahun 2021-2026	51
Tabel 2. 10 Matriks Keterkaitan Misi dalam RPJPD dengan Misi pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara	54
Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Misi Ke-1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	57
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Misi Ke-2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026	58

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	61
Tabel 2. 14 Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	64
Tabel 2. 15 Perkembangan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa Terhadap Total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara	68
Tabel 2. 16 Analisis LQ Sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Miliar Rupiah)	69
Tabel 2. 17 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	71
Tabel 2. 18 Angka Capaian Kinerja Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	72
Tabel 3. 1 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	75
Tabel 3. 2 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	77
Tabel 3. 3 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	80
Tabel 3. 4 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	83
Tabel 3. 5 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	86
Tabel 3. 6 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	88

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025

Evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilakukan atas pemenuhan mandat negara melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Berdasarkan aturan dalam proses evaluasi tersebut, maka evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan metode kualitatif. Adapun beberapa hasil yang didapatkan dalam evaluasi ini tergambar sebagai berikut:

A. Gambaran Umum RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel i. 1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025	
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera	
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju
Misi 2	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri
Misi 3	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera

B. Capaian Kinerja Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Penilaian capaian kinerja pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan pedoman dari Kemendagri tahun 2023. Hasil penilaian diperoleh dari proses agregasi pada capaian kinerja setiap

periode lima tahunan. Adapun pengelompokan hasil kinerja dapat dilihat pada Gambar i.1 yang menunjukkan adanya lima kelas capaian kinerja.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Gambar i. 1 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023

Hasil evaluasi kinerja pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa capaian nilai total kinerja RPJPD sebesar **83,97%**. Angka tersebut menandakan bahwa kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam **Predikat TINGGI** (Tabel i.2) yang mana sangat dekat dengan kelas sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun masuk ke dalam kelas kinerja nomor dua, akan tetapi nilai yang didapatkan tergolong mendekati kelas pertama. Angka capaian kinerja ini sangat dekat dengan kelas sangat tinggi (Gambar i.1).

Tabel i. 2 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

CAPAIAN KINERJA VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB KUTAI KARTANEGARA 2005-2025	83,97
PREDIKAT KINERJA	TINGGI

Di samping itu, kontribusi perolehan angka kinerja total pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini diperoleh dari kontribusi masing-masing misi. Terdapat tiga misi dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Misi pertama dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang **maju** lebih banyak dikaitkan dengan pelayanan tata pemerintahan yang baik dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya, misi kedua dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang **mandiri** lebih ditekankan pada kemandirian dalam pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur, dan nilai luhur agama serta pembiayaan keuangan daerah. Di sisi lain, misi ketiga dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang **sejahtera** ditandai dengan peningkatan perekonomian lokal masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka diketahui bahwa nilai kinerja tertinggi dimiliki oleh misi kedua yang terkait dengan kemandirian pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan misi yang masih perlu menjadi perhatian lebih adalah terkait dengan misi pertama yang mengarah pada tata pemerintahan.



Gambar i. 2 Grafik Capaian Kinerja Pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Sumber: Olah Data, 2023

Secara lebih detail, ketercapaian setiap misi RPJPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

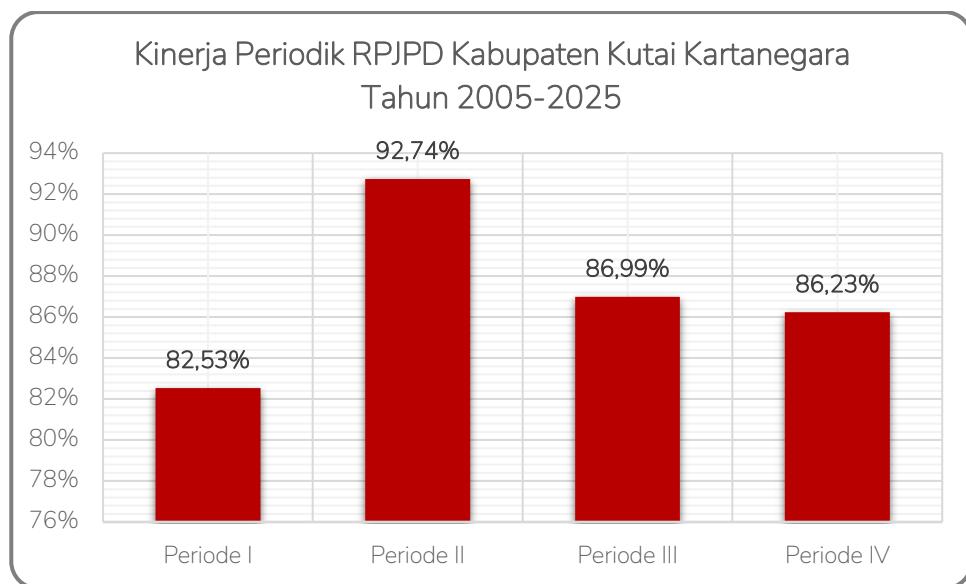
Tabel i. 3 Capaian Kinerja pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

MISI	NARASI MISI	TINGKAT KETERCAPAIAN	KRITERIA
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju	72,78	Sedang
2	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri	96,93	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera	89,36	Tinggi

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas Nilai capaian yang masih tergolong predikat SEDANG terdapat pada misi ke-1 , dimana capaian tersebut banyak dipengaruhi oleh capaian kinerja pada masa pemerintahan periode pertama (tahun 2005-2010). Dimana salah satu indikator kinerjanya adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada akhir periode, terdapat target opini BPK berupa Wajar dengan Pengecualian (WDP), akan tetapi hasil yang didapat adalah *disclaimer of opinion* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini menjadikan target sama sekali tidak terpenuhi atau jika dikuantifikasi menjadi 0%. Berdasarkan evaluasi di atas kemudian nilai capaian pada misi pertama hanya memiliki predikat SEDANG. Hal ini selaras dengan angka capaian penilaian per masing-masing periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Catatan yang perlu diberikan adalah capaian yang periode pemerintah saat ini dapatkan yang masih menyentuh angka 86,23% selama dua tahun terakhir. Perlu adanya peningkatan kinerja yang signifikan agar pencapaian target dapat dipenuhi.



Gambar i. 3 Kinerja Periodik RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Melalui penelaahan terhadap indikator dan sasaran, baik ditinjau dari setiap periode maupun RPJPD secara umum, maka didapatkan beberapa faktor pendorong yang berpengaruh di antaranya ialah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan sehingga transparansi publik dapat terwujud. Selain itu, upaya pembuatan atmosfer demokrasi yang baik juga mendukung peran media massa dan budaya sadar politik di masyarakat. Adapun penyederhanaan alur birokrasi dan reformasi struktur kelembagaan pemerintah daerah turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, komitmen pemerintah yang dituangkan dalam program pembangunan mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan energi untuk masyarakat disertai dengan adanya upaya pengembangan SDM. Program yang telah disusun juga mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang harus segera diatasi, seperti masih rendahnya pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip *good governance*, rendahnya kebebasan pers, rendahnya integritas penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat menurunkan partisipasi dalam pembangunan. Tidak hanya itu, penggunaan sumberdaya anggaran yang belum efisien dan pembangunan infrastruktur yang terkendala kondisi geografis juga menghambat pemerataan pembangunan. Selain itu, kesadaran masyarakat dan aktor bisnis dalam menjaga lingkungan juga masih rendah yang mana dapat diperparah oleh alih fungsi lahan yang tidak terawasi dan terkontrol.

D. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan, maka berikut merupakan rekomendasi tindak lanjut terhadap kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025:

- 1) Diperlukan konsistensi tema pembangunan antara mandat dari dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD lima tahunan, sehingga penilaian antar misi pada masing-masing periode dapat saling terintegrasi.
- 2) Konsistensi kinerja masing-masing periode pemerintahan harus dapat dilakukan untuk kesesuaian dengan pemenuhan target yang telah ditetapkan baik pada RPJPD maupun target pada masing-masing RPJMD. Hal ini memerlukan penekanan pada setiap kinerja tim perencanaan dan tim monev (*monitoring* dan *evaluasi*) pada setiap sektor.
- 3) Capaian kinerja pada periode 4 (tahun 2021-2026) perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- 4) Diperlukan apresiasi kepada beberapa sektor yang telah mencapai target kinerja jangka panjang, seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata serta diperlukan

pencermatan ulang untuk sektor-sektor yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti sektor pemerintahan.

- 5) Rekomendasi tindak lanjut terkait dengan bidang reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip Good Governance.
- 6) Rekomendasi tindak lanjut terkait dengan bidang transformasi ekonomi merujuk pada pentingnya pengembangan sektor unggulan daerah sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Transformasi struktur ekonomi juga perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dengan meningkatkan pengelolaan sektor pertanian dan pariwisata. Dalam hal ini, penerapan teknologi dan inovasi, peningkatan investasi infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan agroindustri dan nilai tambah produk pertanian, serta reformasi kebijakan pertanian dan regulasi merupakan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan.
- 7) Rekomendasi tindak lanjut terkait dengan bidang pengembangan sektor ekonomi unggulan, diperlukan pengoptimalan potensi sektor pertanian dan pembangunan ekonomi kreatif, pengintegrasian dimensi hulu-hilir dalam pengembangan pertanian, serta pembangunan ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelestarian seni budaya lokal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang sebagaimana pelaksanaan dari mandat negara melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Republik Indonesia. Dokumen perencanaan jangka panjang yang dimaksud dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen perencanaan jangka Panjang yang memiliki masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun ini akan memasuki masa akhir perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan pengampu dari pemerintah daerah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Surat tersebut memuat tata cara dan pentahapan pelaksanaan evaluasi dokumen RPJPD seluruh daerah di Indonesia. Substansi mandat yang dikeluarkan melalui surat edaran tersebut menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA atas arahan

Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar melakukan evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Penyusunan evaluasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 yang mencakup pelaksanaan 4 (empat) periode RPJMD;
- b. Kepala BAPPEDA Provinsi melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025;
- c. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025;
- d. Kepala BAPPEDA Provinsi melakukan rekapitulasi atas evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. Kepala BAPPEDA menyajikan data kuantitatif dan informasi terkait indikator makro pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJPD masih memiliki sasaran pokok bersifat kualitatif, maka pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dengan:
 - 1) Mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan; dan
 - 2) Menggunakan evaluasi hasil evaluasi RPJMD periode 2005 sampai dengan 2025.
- g. Pengambilan kesimpulan akhir Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 agar tetap dapat menjelaskan ketercapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2005-2025;

- h. Kepada BAPPEDA menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD 2005–2025 kepada Gubernur/Bupati/Wali kota.

Berdasarkan mandat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat edaran di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diharuskan melaksanakan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 pada tahun 2023 ini. Proses evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja pembangunan jangka Panjang, dan pada akhirnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 mendatang.

1.2 DASAR HUKUM

Beberapa mandat tentang pelaksanaan evaluasi dokument Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 telah disampaikan dalam latar belakang adanya kegiatan ini. Akan tetapi, secara eksplisit masih terdapat beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi ini, yang termuat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.

1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari pelaksanaan evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 adalah untuk melakukan penilaian terhadap target pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan beberapa isu strategis yang akan dilanjutkan dalam RPJPD periode selanjutnya yaitu tahun 2025-2045. Di samping itu, secara eksplisit tujuan dari dilakukannya evaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2045 ini diantaranya adalah:

- 1) Menilai hasil capaian kinerja pembangunan jangka Panjang daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025
- 2) Menyusun dokumen evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana mandat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.4 SKEMA PELAKSANAAN EVALUASI

Berdasarkan panduan pelaksanaan evaluasi RPJPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, maka skema atau metode evaluasi dilaksanakan berdasarkan jenis dokumen RPJPD pada setiap daerah. Apakah dokumen RPJPD pada suatu daerah tersebut telah sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memunculkan indikator dengan target kinerja yang telah ditetapkan, atau tidak sesuai

format tersebut. Dikarenakan format penyusunan dokumen RPJPD ini muncul pada tahun 2017, sedangkan dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan pada tahun 2010, maka pada isi dalam dokumen tersebut belum terdapat indikator beserta target kinerja. Oleh karena itu, skema pelaksanaan dilaksanakan dengan mekanisme kualitatif sebagaimana aturan dalam surat edaran di atas. Adapun beberapa tahapan yang diatur dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimuat dalam panduan pada surat edaran Mendagri memuat sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Bappeda kabupaten/kota menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- c. Hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ke-5 hasil evaluasi RPJMD/RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun-1 atau satu tahun sebelum tahun pelaksanaan evaluasi (bagi RPJMD/RPD yang masih berjalan).

2. Tahap Pelaksanaan

Dengan tidak sesuainya substansi yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 atau bersifat kualitatif, maka Bappeda kabupaten/kota mengubah pencapaian hasil pelaksanaan RPJPD yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut:

- a. Mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan dengan mempedomani formulir 5, dan
- b. Menggunakan hasil evaluasi hasil RPJMD dalam periode 2005–2025 dengan mempedomani formulir 6.

1.5 WAKTU PELAKSANAAN

Evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka Panjang daerah yang termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilaksanakan pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan mandat Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.6 TIM PENYUSUN

Pada panduan evaluasi RPJPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Tim Penyusun evaluasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kerja tim Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ini berada didalam naungan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RPJPD

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025

2.1 GAMBARAN UMUM RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan komprehensif Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode dua puluh tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan RPJPD didasarkan pada kondisi permasalahan pembangunan dan analisis potensi peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Aspek Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang mendiami daerah pedalaman tidak dialokasikan sebagai kawasan pemukiman.
2. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.
3. Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
4. Dari peta fisiografi dapat dilihat bahwa wilayah rawa, perbukitan, dan pegunungan merupakan bagian wilayah yang besar (49,35 persen dari total wilayah kabupaten) dan merupakan kendala dalam memanfaatkan potensi yang ada serta diperlukan dana yang besar untuk mengelolanya.

Proyeksi Peluang:

1. Pemanfaatan lahan di wilayah pantai dan DAS Mahakam yang memiliki kemiringan datar sampai landai dengan curah hujan tinggi dan penyebaran merata sepanjang tahun cocok untuk pengembangan perikanan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan.
2. Berdasarkan analisis kemampuan lahan diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat kemampuan lahan sedang sampai tinggi, sehingga sangat mendukung untuk peningkatan atau pengembangan berbagai jenis kegiatan, baik yang bersifat budidaya maupun non-budidaya.
3. Kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 25 tahun mendatang agar daerah tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, pangan, dan energi.
4. Areal hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai kurang lebih 83,31 persen dari luas wilayah kabupaten. Dari Areal hutan tersebut, sekitar 52,34 persen merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan dan menjaga lingkungan hidup.

Aspek Demografi

Permasalahan:

1. Meski berada di atas angka harapan hidup nasional, namun angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan terendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2. Pola persebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah sangat timpang sebagaimana terlihat dari perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan

Proyeksi Peluang

1. Meningkatnya angkatan kerja merupakan peluang bagi tersedianya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan menjadikan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak memiliki peluang dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah

Permasalahan:

1. Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui, yakni sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor pertambangan migas.
2. Ketergantungan terhadap alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat masih tinggi.
3. Peran lembaga dan instansi penyumbang dan pengumpul PAD belum maksimal.
4. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang sistem alokasi anggaran pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Pertumbuhan sektor pertanian selama periode 2001-2005 belum mampu sepenuhnya mencapai pertumbuhan yang stabil atau belum terlepas dari “perangkap spiral pertumbuhan rendah”.

Proyeksi Peluang

1. Pengelolaan sektor pertambangan dan penggalian perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok pembangunan, seperti pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan, serta disparitas

pendapatan. Namun, tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Kemampuan penyediaan dukungan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang memadai merupakan peluang untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian atau perkebunan.
3. Sektor pertanian yang menonjol dan dapat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah adalah sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor kehutanan. Pengembangan sektor pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan konsep agroindustri atau agrowisata melalui tanaman bernilai tambah tinggi (high value crop).
4. Besarnya peluang untuk mendorong investasi di sektor penyediaan energi mengingat semakin tingginya permintaan energi dan adanya ketersediaan sumber daya serta infrastruktur.
5. Sebagai pusat kegiatan lokal, Kota Tenggarong memiliki peran strategis sebagai kota penyebar kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Aspek Sosial Budaya dan Politik

Permasalahan:

1. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai. Di samping itu, keadaan geografis dan topografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dan terpencil menyulitkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggerakan serta pengawasan program.
2. Persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung belum merata, di mana jumlah tenaga kesehatan lebih banyak berada di daerah perkotaan.

3. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum masih relatif rendah, yaitu setara pendidikan SLTP Kelas 3, terutama di wilayah perdesaan.
4. Belum semua kepala keluarga Kelompok Adat Terpencil (KAT) diberdayakan.
5. Tingginya pertumbuhan kasus kejahatan selama lima tahun terakhir dapat berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap proses pembangunan.

Proyeksi Peluang:

1. Pengembangan sektor pariwisata (wisata alam dan budaya) dan dapat dijadikan sebagai entry point bagi pengembangan ekonomi.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pewaris kerajaan tertua di Indonesia merupakan anugerah dan kebanggaan sejarah bagi masyarakat.
3. Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu masyarakat yang mengedepankan penegakan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.
4. Meningkatnya kesempatan/peluang atau penciptaan lapangan kerja oleh masyarakat sebagai dampak dari berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan tepat guna yang diiringi oleh terwujudnya kemandirian serta jiwa kewirausahaan penduduk.

Aspek Prasarana dan Sarana

Permasalahan:

1. Sarana fisik jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di wilayah perdesaan dan kualitasnya masih belum memadai.
2. Pelayanan listrik dan air bersih belum menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di daerah perdesaan. Hal ini mendorong sebagian

masyarakat untuk menggunakan sumber daya air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Proyeksi Peluang:

1. Sulitnya mengembangkan prasarana perhubungan dan sistem transportasi yang disebabkan oleh kondisi geografis dan karakteristik fisik wilayah.
2. Keterbatasan pasokan listrik oleh PLN dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan industri dan rumah tangga.
3. Keterbatasan pasokan air bersih oleh PDAM yang belum mampu melayani semua kecamatan dan desa

Aspek Tata Pemerintahan

Permasalahan:

1. Kualitas layanan umum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan. Kekurangan pelayanan birokrasi disebabkan antara lain: (1) kurangnya kompetensi aparatur pemerintah; (2) kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang; dan (3) kurangnya koordinasi intensif antarinstansi.
2. Pembangunan hukum yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, rendahnya disiplin berlalu lintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar.
3. Secara kelembagaan, pencapaian sasaran pembangunan dibagi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan utama pembagian SKPD untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program pembangunan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan.

4. SDM merupakan aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu melakukan pengelolaan SDM (aparatur) yang dimiliki secara komprehensif dan berkesinambungan. Kompetensi calon pejabat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penugasan seorang aparat untuk menduduki dan menyandang tugas jabatan tertentu.

Proyeksi Peluang:

1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembangunan dan pelayanan publik akan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih cepat maju dan berkembang.
2. Pemberian insentif pajak, kemudahan administrasi perizinan, dan jaminan kepastian hukum dan keamanan merupakan salah satu usaha untuk menarik investor.
3. Potensi SDA dan keanekaragaman budaya merupakan modal dasar untuk meningkatkan iklim investasi yang akan terus berkembang dinamis.

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah kabupaten, maka visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus terukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan

“Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera”. Penjelasan secara rinci setiap pokok-pokok yang terkandung dalam visi tersebut, dapat tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Pokok-Pokok Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera	Maju	Suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama. Kemajuan yang diharapkan meliputi kemajuan dibidang ekonomi dan sosial budaya melalui pemberdayaan sumber daya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan lestari. Kemajuan dibidang ekonomi antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan regional, dan meningkatnya distribusi pendapatan. Kemajuan dibidang sosial budaya ditunjukkan dengan semakin membaiknya indikator kependudukan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya partisipasi politik

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025
	Mandiri	<p>masyarakat. Pola pemanfaatan sumber kekuatan daerah yang dilakukan harus mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang, sehingga proses pembangunan akan tetap lestari sampai akhir jaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada, serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri serta dapat saling mengisi di dalam memperbaiki taraf hidup mereka pada tataran pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dasar. Aspek penting yang dapat diukur adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, yang dimaksudkan dengan masyarakat mandiri adalah masyarakat yang</p>

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025
	Sejahtera	<p>mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunan daerah dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung pada pihak luar.</p> <p>Mewujudkan suatu keadaan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius bagi seluruh warga masyarakat. Aspek penting yang harus mendapat perhatian adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya distribusi pendapatan. Dalam pembangunan kewilayahan harus diperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semakin baiknya distribusi pendapatan diharapkan akan mengurangi</p>

Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025
		tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Visi di atas kemudian dapat diturunkan menjadi misi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju

Misi ini diharapkan dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *re-inventing government*; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranan masyarakat sipil; meningkatkan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat; melakukan pemberahan struktur kelembagaan pemerintah daerah; memperbaiki kualitas layanan publik; meningkatkan budaya tertib hukum; menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil.

2) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri

Misi ini diharapkan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat; peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha; peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara; peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

meningkatkan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan IPTEK; pengoptimalan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; mempersiapkan sektor- sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi; mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan

3) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera

Misi ini diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; peningkatan pemerataan pembangunan dan pendapatan; mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, peningkatan kinerja sektor pertanian dan perkebunan; peningkatan kinerja sektor pariwisata; peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi; peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa; membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke perdesaan; peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat; mengembangkan jiwa kewirausahaan; peningkatan ketersediaan pasokan energi.

Ketiga misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam sasaran pembangunan serta dapat diturunkan ke dalam arahan umum dan fokus arahan umum pembangunan yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 tertuang dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

<p>Visi Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025:</p> <p>“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”</p> <p>Misi 1:</p> <p>Perwujudan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju</p> <p>Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p>									
<p>S1: Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Reinventing Government</i></p> <p>S2: Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh</p> <p>S3: Memperkuat peranan masyarakat sipil</p> <p>S4: Peningkatan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal</p> <p>S5: Menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat</p> <p>S6: Melakukan pembentahan struktur kelembagaan pemerintah daerah</p> <p>S7: Peningkatan kualitas layanan publik</p> <p>S8: Peningkatan budaya tertib hukum</p> <p>S9: Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil</p>									
<p>Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>A1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki ketatapemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), berkeadilan, dan demokratis yang berlandaskan hukum</p> <p>A2: Mengembangkan budaya politik</p> <p>A3: Mewujudkan akuntabilitas publik</p> <p>A4: Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi</p> <p>A5: Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik</p> <p>A4: Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah Kab Kutai Kartanegara yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi</p> <p>A6: Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah</p> <p>A7: Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara</p> <p>A3: Mewujudkan akuntabilitas publik</p>									
<p>Fokus dari Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>F1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai</p> <p>F2.1: Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai</p> <p>F3: Jaminan penegakan Peraturan Daerah</p> <p>F4.1: Proses penataan struktur organisasi agar</p> <p>F5.1: Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan</p> <p>F4.1: Proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi yang</p> <p>F6.1: Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui penerapan</p> <p>F7.1: Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku</p> <p>F3: Jaminan penegakan Peraturan</p>									



kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi publik	politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media	(Perda) yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal	dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik	mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen	diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik	prinsip-prinsip <i>re-inventing goverment</i>	penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Daerah (Perda) yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal
	F2.2: Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa		F4.2: Upaya mewujudkan efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat	F5.2: Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas	F4.2: Upaya mewujudkan efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	F6.2: Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	F7.2: Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat	
				F5.3: Menciptakan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi yang mampu		F6.3: Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan	F7.3: Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para	

				menghubungkan seluruh link informasi yang ada		dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah	penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik	
				F5.4: Memanfaatkan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi secara efektif		F6.4: penguatan lembaga legislatif		

Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Tabel 2. 3 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

<p style="text-align: center;">Misi 2: Perwujudan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri</p> <p style="text-align: center;">Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p>											
S1: Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	S2: peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	S3: peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	S4: peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	S5: peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	S6: peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S7: meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan IPTEK	S8: pengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	S9: mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	S10: mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan		
<p style="text-align: center;">Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p>											
A1: Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	A2: Meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	A3: Meningkatkan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	A4: Meningkatkan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	A5.a: Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	A5.b: Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	A6.a: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	A6.b: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai usaha untuk melindungi ruang hidup manusia	A7: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan IPTEK	A8: Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	A9: Mengembangkan sektor-sektor berbasis sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	A10: Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan
<p style="text-align: center;">Fokus dari Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p>											
F1: peningkatan kualitas SDM daerah	F2.1: menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat	F3.1: menyediakan sumber energi yang berasal dari daerah sendiri	F4: memperbaiki sistem transportasi dan fasilitas pendukungnya secara terpadu	F5.a.1: mengurangi ketergantungan sumber pendanaan pembangunan daerah	F5.b.1: pada pembangunan sarana ibadah, mengembangkan sikap toleransi dan saling	F6.a.1: sarana dan prasarana kesehatan masyarakat secara merata dan	F6.b.1: reklamasi daerah eks pertambangan/ penggalian	F7.1: Pemerataan pendidikan dasar sampai dengan SMU diarahkan untuk meningkatkan	F8.1: Membentuk cagar alam, suaka margasatwa, dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan perlindungan	F9.1: Peningkatan sektor pertanian, dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan menerapkan	F10.1: Peningkatan optimalisasi pemanfaatan SDA pada saat ini dengan menerapkan



			yang dapat menghubungkan semua wilayah/daerah dengan aman, nyaman, dan murah	yang berasal dari pemerintah pusat	berkomunikasi antar pemeluk agama yang berbeda	terjangkau oleh semua penduduk di setiap daerah		partisipasi sekolah warga Kabupaten Kutai Kartanegara		budaya	AMDAL yang ketat sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga
	F2.2: mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap daerah lain	F3.2: mencari sumber energi alternatif					F6.b.2: meningkatkan konservasi alam di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam	F7.1: Pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan tersedianya SDM dibidang pertambangan dan penggalian, pertanian, dan pariwisata, di samping keahlian ilmu sosial lainnya	F8.2: Menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) secara taat asas dan ketat bagi setiap usaha eksploitasi sumber daya hayati		F10.2: Menggunakan hasil optimalisasi SDA sebagai modal untuk pengembangan sektor-sektor basis lainnya khususnya sektor pertanian, dan pariwisata
							F6.b.3: reboisasi				

Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Tabel 2. 4 Penjabaran sasaran, arahan umum, dan fokus dari arahan umum pembangunan Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

<p style="text-align: center;">Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera</p> <p style="text-align: center;">Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara</p>									
S1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan	S2: Peningkatan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan	S3: Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perkebunan	S4: Peningkatan kinerja sektor pariwisata	S5: Peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	S6: Peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa dalam rangka pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	S7: Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke pedesaan	S8: Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	S9: Mengembangkan jiwa kewirausahaan	S10: Peningkatan ketersediaan pasokan energi
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara									
A1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat	A2: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan secara menyeluruh	A3: Meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui program revitalisasi pertanian	A4: Meningkatkan sektor pariwisata melalui program pariwisata berbasis masyarakat (PBM)	A5: Meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	A6: Meningkatkan pembangunan daerah di tingkat kecamatan dan desa yang diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	A7: Tersedianya infrastruktur yang berkualitas di pedesaan	A8: Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	A9: Pengembangan jiwa kewirausahaan guna mengurangi jumlah pengangguran	A10: Tersedianya pasokan energi
Fokus dari Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara									
F1: Pemberdayaan sumber daya ekonomi yang memiliki nilai		F3.1: Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian melalui perluasan lahan,	F4.1 : Meningkatkan kinerja pariwisata berbasis wisata	F5.1:	F6.1: Peningkatan investasi yang terarah pada faktor-	F8.1: Memenuhi ketersediaan jaringan infrastruktur dengan tujuan	F9.1:	F10.1: Meningkatkan pelatihan kewirausahaan	



tambah tinggi berbasis pada masyarakat dan lestari		peningkatan teknologi, kualitas benih dan penguasaan teknologi	alam, ekologi dan budaya		faktor produksi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis di daerah	untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dan meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa			
		F3.2: Meningkatkan diversifikasi produk pangan dengan pengembangan pangan yang berbasis bahan baku lokal		F5.2:	F6.2:	F8.2:	F9.2:	F10.2: Meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	
		F3.3 : Meningkatkan daya saing produk dan pengembangan industri berbasis pertanian dan mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi							
		F3.4 : Mengembangkan agroindustri, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat desa dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian							

Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 tidak memiliki rumusan eksplisit tentang indikator kinerja pembangunan. Jika didalami, beberapa target pembangunan hanya tertuang dalam sasaran pokok. Akan tetapi, setiap sasaran pokok yang sifatnya adalah gambaran tentang hasil akhir dari pembangunan jangka panjang, belum memuat tentang target angka yang akan dicapai di akhir tahun perencanaan. Oleh karena itu, berdasarkan panduan dari Kemendagri tentang tata cara evaluasi RPJPD, maka dapat ditetapkan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 bersifat *kualitatif* atau tidak sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, proses evaluasi dilakukan dengan metode kualitatif, sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.

Di samping itu, ketentuan dalam melaksanakan evaluasi dengan metode kualitatif, dapat didekati dengan proses evaluasi pada setiap periode perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD setiap periode lima tahunan. Untuk mencapai arah dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini yang kemudian memerlukan pemahaman terhadap rumusan sasaran pembangunan dan arahan kebijakan jangka menengah lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 3 (tiga) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperbaiki kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

1. RPJMD Tahap 1 (2005-2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui.

Sasaran pembangunan pada RPJMD tahap 1 adalah:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat;
- 3) Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu:

- 1) Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan;
- 2) Menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik;
- 3) Melakukan revitalisasi pertanian.

2. RPJMD Tahap 2 (2011-2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Kutai Kartanegara di segala bidang dengan menekankan upaya pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pertanian dan perkebunan dalam artian luas, dan pengembangan kepariwisataan.

Sasaran pembangunan pada RPJMD tahap 2 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi;

- 2) Meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian;
- 3) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- 2) Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas,
- 3) Peningkatan kepariwisataan.

3. RPJMD Tahap 3 (2016-2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari. Di samping itu pembangunan diarahkan pula untuk pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan (pendidikan, pertanian dalam artian luas, dan kepariwisataan).

Sasaran pembangunan pada RPJMD tahap 3 adalah:

- 1) Meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan oleh: a) sektor pertanian sebagai *leading sector* pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi, b) meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c) semakin beranekaragam produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pangan lokal, d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian di pasar lokal, nasional, dan internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (high value crops); dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja di sektor pertanian.

- 2) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam dan budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- 3) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), meningkatnya kelulusan dalam UAN, dan meningkatnya masyarakat melek aksara.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas;
- 3) Peningkatan kepariwisataan.

4. RPJMD Tahap 4 (2021-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari. Pembangunan 5 (lima) tahun yang keempat juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, meningkatnya kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Di samping itu pada tahap RPJMD ke-4 harus mampu meletakkan dasar yang kokoh untuk memulai tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Sasaran pembangunan pada RPJMD tahap 4 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis , dan berbudaya tinggi,

- 2) Meningkatnya jumlah wirausaha baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,
- 4) Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- 5) Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah.
- 7) Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
- 8) Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
- 9) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut: a) meningkatnya partisipasi masyarakat; b) tegaknya supremasi hukum; c) meningkatnya transparansi; d) peduli pada stakeholders; e) berorientasi pada konsensus; f) meningkatnya kesetaraan; g) meningkatnya efektivitas dan efisiensi; h) meningkatnya akuntabilitas; dan i) mempunyai visi strategis. 8) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH KUTAI KARTANEGERA

Indikator makro pembangunan digunakan untuk dapat melihat ketercapaian pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dibandingkan dengan ketercapaian pada skala provinsi maupun secara nasional. Secara umum, ketercapaian pembangunan secara makro di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif lebih tinggi daripada rata-rata provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Hal ini menandakan bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional relatif sangat tinggi. Lebih lanjut penyampaian data dan analisis dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Indikator Makro	Nilai Kabupaten Kukar			Nilai Provinsi Kalimantan Timur			Nilai Nasional			Analisis Ketercapaian	Ket
		2005	2022	r	2005	2022	r	2005	2022	r		
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.27	74.67	4.77%	72.94	77.44	6.17%	69.57	72.91	4.8%	Tren: Naik Pada tahun 2022 nilai IPM Kutai Kartanegara sebesar 74,67 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian nasional pada tahun yang sama namun lebih rendah dari capaian provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang signifikan selama 20 tahun sebesar 4.77% akan tetapi peningkatan tersebut masih lebih rendah dari capaian peningkatan IPM provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.	Tahun 2005 menggunakan metode lama, Tahun 2022 menggunakan metode baru
2	Angka Kemiskinan	14.72	7.96	(45.92) %	10.57	6.31	(40.30) %	15.97	9.57	(40,08) %	Tren: Turun Pada tahun 2022 capaian Angka kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara masih	

No	Indikator Makro	Nilai Kabupaten Kutai			Nilai Provinsi Kalimantan Timur			Nilai Nasional			Analisis Ketercapaian	Ket
		2005	2022	r	2005	2022	r	2005	2022	r		
											relatif lebih tinggi dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi lebih rendah dari capaian nasional. Penurunan capaian Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dari pada provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.	
3	Angka Pengangguran	10.12	4.14	(59.09)%	9.04	5.71	(36.84)%	11.24	5.86	(47,86)%	Tren: Turun Pada tahun 2022 angka pengangguran yang diukur dari nilai TPT Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah dari angka pengangguran di provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Penurunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dari penurunan capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.	
4	Pertumbuhan Ekonomi	2.67	3.73	39.70%	2.95	4.48	51.86%	5.6	5.31	(5,18)%	Tren: Naik Angka pertumbuhan ekonomi antara tahun 2005 dan 2022 mengalami kenaikan, akan	

No	Indikator Makro	Nilai Kabupaten Kukar			Nilai Provinsi Kalimantan Timur			Nilai Nasional			Analisis Ketercapaian	Ket
		2005	2022	r	2005	2022	r	2005	2022	r		
											tetapi dibandingkan dengan nilai Provinsi dan Nasional masih lebih rendah.	
5	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	0.29	0.269	(7.24)%	0.370	0.317	(14.32)%	355	381	7.32%	Ketimpangan pada pendapatan dapat ditunjukkan dengan semakin tingginya gini rasio, maka semakin timpang pendapatan daerah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai relative di bawah kondisi provinsi dan nasional pada tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian rasio gini Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0.269 sehingga tergolong kategori rendah. Selama 20 tahun menunjukkan ketimpangan - 7.24% semakin rendah.	

No	Indikator Makro	Nilai Kabupaten Kukar			Nilai Provinsi Kalimantan Timur			Nilai Nasional			Analisis Ketercapaian	Ket
		2005	2022	r	2005	2022	r	2005	2022	r		
6	PDRB Per Kapita	113.6 4 juta	254.5 juta	123.95 %	62.4 juta	238.7 juta	282.53 %	8.20 juta	71.03 juta	766.22	PDRB per kapita mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi selama 20 tahun yang mengakibatkan nilai PDRB per kapita menjadi tinggi. Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan provinsi dan nasional. Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional.	

Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kutai Kartanegara pada tahun 2022 mencapai 74,67 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian nasional pada tahun yang sama namun lebih rendah dari capaian provinsi Kalimantan Timur. Di sisi lain, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang signifikan selama 20 tahun sebesar 4.77% akan tetapi peningkatan tersebut masih lebih rendah dari capaian peningkatan IPM provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 masih relatif lebih tinggi dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi lebih rendah dari capaian nasional. Penurunan capaian Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dari pada provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Angka pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal tersebut menunjukkan terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2005 hingga 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 masih lebih rendah dari angka pengangguran di provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dari penurunan capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator kemajuan dari suatu daerah dan bagaimana hasil pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Apabila pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, akan terlihat laju pertumbuhan yang meningkat. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2005 sampai dengan 2021 terus menunjukkan tren peningkatan. Pada periode pertama (2005-2009) rata-rata capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 2,68%. Pada periode kedua (2010-2014) terjadi pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi dengan nilai rata-rata 4,4% dan pada periode ketiga (2015-2019) terjadi peningkatan nilai dengan rata-rata 5%, serta pada periode keempat (2020-2021)

terjadi peningkatan dengan nilai rata-rata 6%. Berdasarkan kenaikan tren keempat periode dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan strategi *output* perekonomian yang positif.

Ketimpangan pada pendapatan dapat ditunjukkan dengan semakin tingginya gini rasio, maka semakin timpang pendapatan daerah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai relative di bawah kondisi provinsi dan nasional pada tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian rasio gini Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0.269 sehingga tergolong kategori rendah. Selama 20 tahun menunjukkan ketimpangan -7.24% semakin rendah.

PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi selama 20 tahun yang mengakibatkan nilai PDRB per kapita menjadi tinggi. Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan provinsi dan nasional. Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

2.3 EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SETIAP PERIODE LIMA TAHUNAN

Kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 mempunyai karakteristik yang bersifat kualitatif, sehingga diperlukan konversi pencapaian pelaksanaan menjadi data kuantitatif melalui berbagai proses pemeriksaan, penelitian, analisis, dan telaah dokumen, khususnya dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk setiap periode. Implementasi kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap periode perlu dipantau dan dievaluasi secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil kinerja tersebut kemudian diberikan penilaian berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Melalui evaluasi kinerja, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai sejauh mana RPJMD telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja juga berperan penting dalam memperbaiki kebijakan dan program yang telah dijalankan serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu, evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap periode juga memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

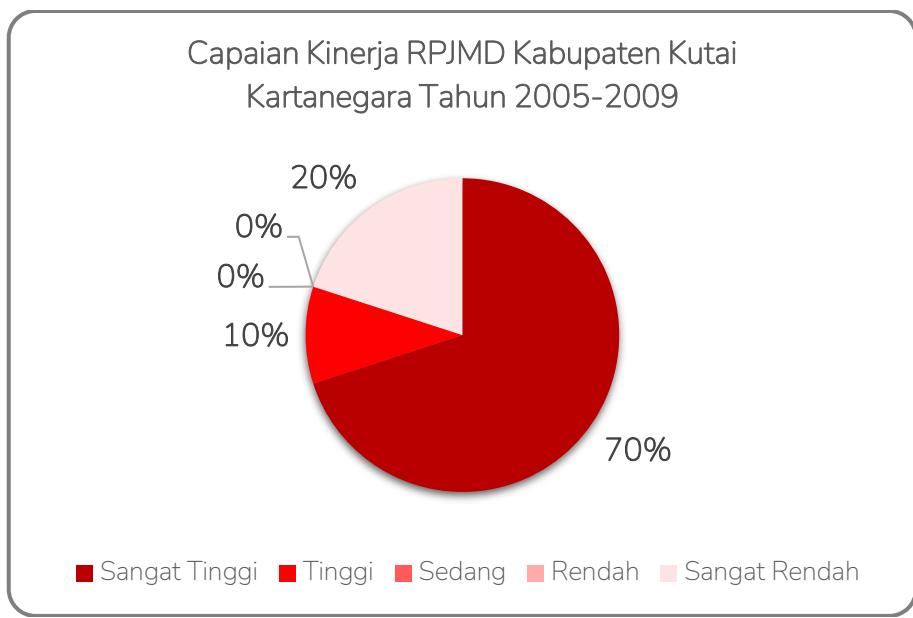
2.3.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE I (TAHUN 2005-2010)

Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2010 diukur dengan membagi realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan pada setiap indikator pada setiap misi. Setiap capaian kinerja yang tercapai pada tiap indikator kemudian diberikan kategori sesuai dengan capaian persentase capaian kinerjanya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2010 menunjukkan bahwa

sebagian besar capaian indikator kinerja berada pada kategori sangat tinggi kedua (Gambar 2.1), terutama pada indikator yang terdapat pada misi. Perhitungan terkait dengan persentase ketercapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2010 secara lebih rinci bisa dilihat di Lampiran III Tabel 1. Formulir 6 Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025.

Tabel 2. 6 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode I Tahun 2005-2010

No.	Kriteria Penilaian	Persentase	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	70%	7
2	Tinggi	10%	1
3	Sedang	0%	0
4	Rendah	0%	0
5	Sangat Rendah	20%	2
Total		100%	10



Gambar 2. 1 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode I Tahun 2005-2010

Secara umum, kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode I berada pada kategori tinggi dengan rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 82,53%. Di mana dari total 10 indikator pada periode tersebut, terdapat 7 kriteria penilaian sangat tinggi (70%), 1 kriteria penilaian tinggi (10%), dan 2 kriteria penilaian

sangat rendah (20%). Banyaknya indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian kinerja sangat tinggi pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2010 didukung oleh banyaknya indikator yang memiliki realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan, terutama pada indikator kinerja dalam mencapai tujuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat 2 indikator, yaitu Opini BPK terhadap LKPD Kukar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang memiliki tingkat ketercapaian sangat rendah karena belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pada Misi 1, dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD Kukar, Pada akhir periode, target opini BPK berupa Wajar dengan Pengecualian (WDP), akan tetapi hasil yang didapat adalah *disclaimer of opinion* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini menjadikan target sama sekali tidak terpenuhi atau jika dikuantifikasi menjadi 0%, hal ini dipengaruhi karena belum memadainya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan aspek pelaporan keuangan daerah. Selain itu, tidak adanya kesamaan struktur organisasi pada tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan juga mengakibatkan terputusnya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan dan pembagian tugas. Kemudian pada misi ke 3 , tingkat pengangguran terbuka juga belum tercapai dari target yang ditentukan, kondisi ini sangat dipengaruhi dengan masih bergantungnya kondisi perekonomian pada sektor pertambangan dan penggalian sehingga ketika terjadi resesi ekonomi, banyak kasus pemutusan hubungan kerja yang mempunyai dampak meningkatnya TPT di Kutai Kartanegara.

2.3.2 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE II (TAHUN 2011-2015)

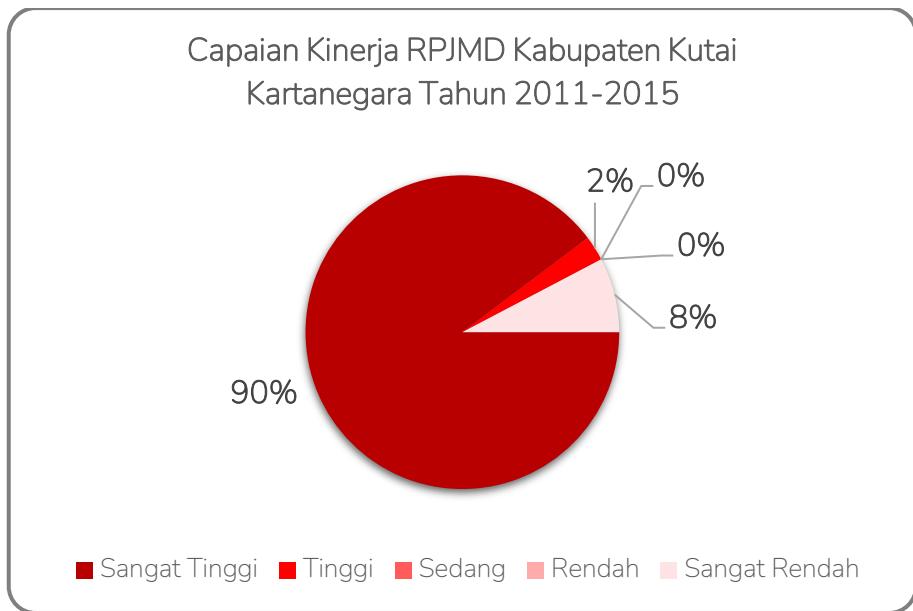
Pengukuran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015 diukur melalui perhitungan realisasi terhadap target pada setiap indikator di setiap misi. Capaian kinerja yang telah dihitung akan diklasifikasikan dengan mengikuti kategori yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai setiap tujuan dalam misi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Secara umum, kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode II berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian realisasi kinerja sebesar 90.95 Perhitungan terkait dengan persentase ketercapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 secara lebih rinci bisa dilihat di Lampiran III Tabel 3. Formulir 6 Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025.

Adapun dalam pengelompokan 39 indikator berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan 35 indikator yang berpredikat sangat tinggi dengan nilai predikat di atas 90% dan terdapat tiga indikator berpredikat sangat rendah dengan nilai predikat di bawah 50% serta satu indikator dengan predikat tinggi (Tabel 2.7)

Tabel 2. 7 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode II Tahun 2011-2015

No.	Kriteria Penilaian	Persentase	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	89,74	35
2	Tinggi	2,56	1
3	Sedang	0%	0
4	Rendah	0%	0
5	Sangat Rendah	7,69	3
Total		100%	100



Gambar 2. 2 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode II Tahun 2011-2015

Secara lebih rinci, indikator-indikator dalam misi pertama, empat, lima, enam, dan tujuh menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan memenuhi target capaian. Salah satu indikator dengan predikat sangat baik ialah jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi yang digunakan untuk mengukur sasaran berupa "meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan" dalam misi kedua. Realisasi indikator ini mampu melebihi target sebesar 129 LPM yang tercapai hingga 237 LPM, artinya indikator di atas mencapai 183,72% dari target yang ditetapkan untuk akhir periode RPJMD Tahun 2011-2015. Di sisi lain, masih terdapat 3 indikator yang capaiannya rendah. Indikator pertama dengan capaian yang rendah adalah persentase penduduk miskin yang mengukur "menurunnya angka kemiskinan" pada misi kedua. Pada 2011 sebagai awal tahun perencanaan RPJMD, persentase penduduk miskin berada di angka 8,73 dan ditargetkan turun hingga menjadi 4,36% di akhir tahun perencanaan. Akan tetapi, pada realisasinya program yang dijalankan hanya bisa menurunkan 0,74% angka penduduk miskin hingga menjadi 7,99. Capaian ini dinilai masih jauh dari tujuan dan berdasarkan formulasi perhitungan indikator hanya mencapai 16,74% target. Adapun rendahnya

capaian target ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja dan distribusi bantuan modal usaha, untuk dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya keluar dari garis kemiskinan.

Indikator capain rendah berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target penurunan TPT di akhir periode pelaksanaan RPJMD Periode II pada misi ketiga belum tercapai dari target sebesar 3,79 dengan realisasi capaian TPT sebesar 10,22. Secara umum, dalam kurun waktu periode awal RPJMD Tahun ke-2 angka pengangguran turun. Namun terdapat kejadian meningkatnya TPT pada tahun 2015, merupakan ekses terhadap melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah yang berimbas pada menurunnya volume produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja, selain daripada itu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendataan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun pula dari pendatang.

Indikator berikut yang capaiannya sangat rendah adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada misi keempat dimana persentase capaian pada akhir periode sebesar 48,32%. Dimana target akhir periode adalah 6,957.452 Juta hanya terealisasi sebesar 3.361.189 Juta. Kondisi ini dipengaruhi salah satunya adalah kualitas produk lokal yang belum mampu bersaing di pasar global maupun nasional apalagi dibandingkan dengan produk-produk impor, serta masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang pasar.

2.3.3 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE III (TAHUN 2016-2021)

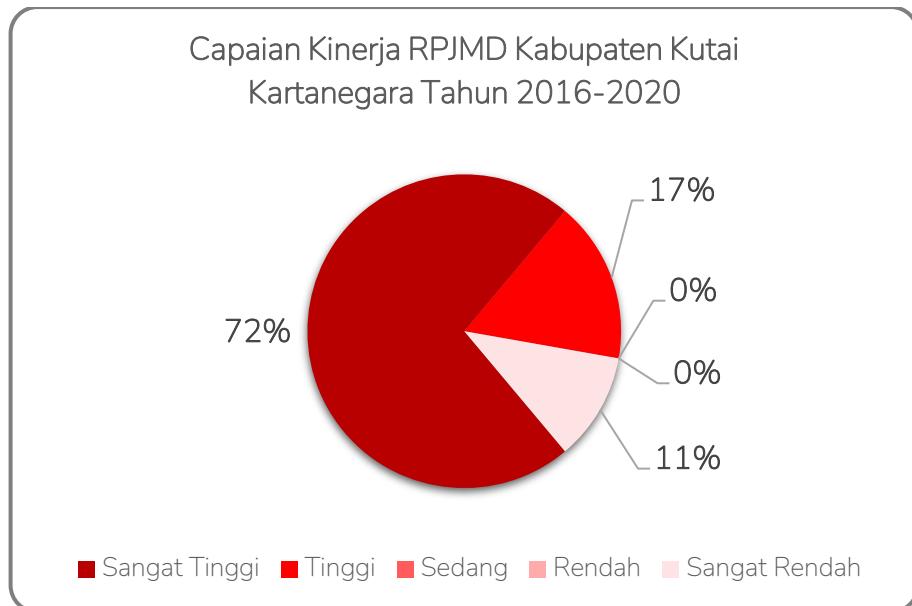
Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 diukur dengan menggunakan capaian kinerja tiap indikator pada tiap misi. Capaian kinerja yang diperoleh pada tiap indikator akan diberikan kriteria penilaian realisasi kinerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023. Dalam analisis capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 indikator kinerja yang digunakan adalah berasal dari dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Penggunaan dokumen tersebut dilakukan karena RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tahun 2016 telah mengalami perubahan yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Analisis ketercapaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa terdapat 18 indikator yang merepresentasikan capaian kinerja RPJMD periode III (Tabel 2.8). Secara garis besar capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kriteria penilaian yang berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata realisasi capaian sebesar 86,99. Perhitungan terkait dengan persentase ketercapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 secara lebih rinci bisa dilihat di Lampiran III Tabel 3. Formulir 6 Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025.

Tabel 2.8 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode III Tahun 2016-2021

No.	Kriteria Penilaian	Persentase	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	72,22%	13
2	Tinggi	16,67%	3
3	Sedang	0%	0
4	Rendah	0%	0

No.	Kriteria Penilaian	Persentase	Jumlah Indikator
5	Sangat Rendah	11,11%	2
Total		100%	18



Gambar 2. 3 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode III

Rincian capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 (Tabel 2.8), yaitu kriteria penilaian sangat tinggi terdapat sebanyak 13 indikator, kriteria penilaian tinggi terdapat sebanyak 3 indikator, dan kriteria sangat rendah sebanyak 2 indikator sedangkan di lain sisi tidak ada capaian indikator kinerja yang termasuk kriteria penilaian sedang dan rendah. Namun, secara keseluruhan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 telah mencapai angka 86,99 atau telah berada pada capaian tinggi. Banyaknya indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian kinerja sangat tinggi pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 didukung dengan banyaknya indikator yang memiliki realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Indikator RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan capaian kinerja sangat tinggi diantaranya adalah pertumbuhan nilai investasi telah mencapai angka realisasi sebesar 2,01% dengan target sebesar 1,98%

yang berarti capaian kinerja indikator tersebut telah mencapai 100%. Ketercapaian pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut didorong dengan posisi daerah yang sangat strategis sebagai salah satu bagian dari Ibu Kota Negara Baru. Selain itu, adanya potensi sumber daya alam yang melimpah terutama dari sisi pertambangan dan perkebunan juga turut meningkatkan pertumbuhan investasi. Pemerintah setempat juga turut menciptakan regulasi yang baik dalam bidang investasi, mempertahankan stabilitas politik dan kondisi sosial budaya juga turut menjadi faktor pendorong investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun, di sisi lain terdapat 2 indikator dengan ketercapaian kinerja yang masih sangat rendah. Indikator dengan tingkat capaian kinerja yang masih sangat rendah pada misi ke empat adalah berupa pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan realisasi berturut-turut adalah sebesar 1,26% dan 2,72 % dari target sebesar 7,16% dan 7,97%. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 hanya mencapai angka 14,8% dan 34,13%. Masih rendahnya ketercapaian indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan sektor pariwisata ini diakibatkan karena potensi sektor tambang masih memiliki magnet terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

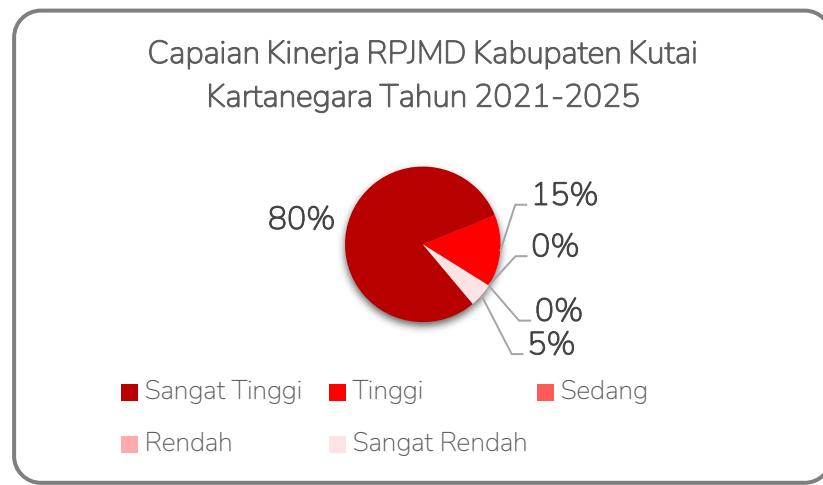
2.3.4 CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE IV (TAHUN 2021-2026)

Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dapat diukur melalui target dan realisasi tiap indikator di dalam misi yang tercantum dalam rencana tersebut. Setiap indikator pada tiap target dilihat ketercapaianya kemudian diberi predikat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa secara umum ketercapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-

2026 sudah masuk ke dalam kriteria penilaian tinggi. Perhitungan pencapaian kinerja RPJMD Periode ke IV, hanya sampai 2 tahun pelaksanaan periode rencana tahunan (2021-2022) dengan rata-rata kinerja capaian sebesar 86,23. Analisis ketercapaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa terdapat 20 indikator yang merepresentasikan capaian kinerja RPJMD periode IV (Tabel 2.9). Sebanyak 16 indikator memiliki kriteria penilaian yaitu sangat tinggi, sebanyak 3 indikator memiliki kriteria penilaian yaitu tinggi, dan hanya 1 indikator yang memiliki kriteria penilaian yaitu sangat rendah. Perhitungan terkait dengan persentase ketercapaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 secara lebih rinci bisa dilihat di Lampiran III Tabel 4. Formulir 6 Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025.

Tabel 2. 9 Persentase dan Jumlah Indikator Kriteria Penilaian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode IV Tahun 2021-2026

No.	Kriteria Penilaian	Persentase	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	80%	16
2	Tinggi	15%	3
3	Sedang	0%	0
4	Rendah	0%	0
5	Sangat Rendah	6%	1
Total		100%	20



Gambar 2. 4 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode IV Tahun 2021-2026

Banyaknya indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian kinerja sangat tinggi pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 didukung dengan banyaknya indikator yang memiliki realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Misalnya pada sasaran berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif yang dicapai melalui laju pertumbuhan ekonomi kreatif telah mencapai angka realisasi sebesar 6,96% dengan target sebesar 6,11%. Tingginya ketercapaian kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tentu saja didukung oleh berbagai faktor pendorong, seperti dukungan kebijakan atau regulasi, kesadaran dan komitmen masyarakat dan pemerintah, perbaikan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta produksi pertanian yang besar. Sedangkan untuk indikator dengan tingkat capaian kinerja yang masih sangat rendah adalah berupa laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada misi ke tiga dengan realisasi sebesar 1,91% dan dari target sebesar 5,69%. kondisi ini masih menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Kartanegara masih memegang peranan yang besar dalam struktur perekonomian daerah, dan hal ini mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi masih belum berjalan optimal.

2.4 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA SETIAP MISI

Fokus evaluasi di bagian ini adalah ketercapaian pembangunan yang telah dilakukan selama dua dekade telah mencapai target setiap misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Pedoman evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran menyebutkan bahwa pendekatan evaluasi secara kualitatif dapat dilakukan dengan mengevaluasi setiap indikator dalam RPJMD pada empat periode. Setiap indikator terkait dengan setiap misi dalam masing-masing RPJMD. Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan pencapaian setiap misi dalam

RPJMD pada setiap periode dengan penilaian pencapaian misi pada RPJPD ini. Diperlukan formula untuk mengintegrasikan hal tersebut, sehingga target evaluasi pencapaian pada setiap misi RPJPD dapat tercapai.

Formulasi yang dibutuhkan dilakukan dengan menggunakan pendekatan matriks pengintegrasian antara misi RPJPD dan misi dalam setiap RPJMD pada setiap periode. Artinya, setiap misi yang tercantum dalam RPJMD setiap periode memiliki tujuan yang spesifik dalam sektor tertentu, dan sektor tersebut dapat memiliki kesamaan dengan tujuan misi dalam RPJPD. Hasil pencapaian dari setiap misi dalam RPJMD dapat dikumpulkan dan diintegrasikan untuk membentuk evaluasi hasil pencapaian dalam misi RPJPD yang relevan. Dalam hal RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, setiap misi yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui berbagai misi yang ada dalam RPJMD pada setiap periode, dan hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2. 10 Matriks Keterkaitan Misi dalam RPJPD dengan Misi pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Misi pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara			
	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
Misi 1: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju	I.1 Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum	II.1 Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance	III.1 Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	IV.1 Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani
Misi 2: Mewujudkan masyarakat	I.2 Pemberdayaan seluruh	II.2 Meningkatkan kualitas dan	III.2 Meningkatkan Sumber Daya	IV.2 Meningkatkan pembangunan

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Misi pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara			
	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri	<p>komponen ekonom</p> <p>daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>II.5 Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas</p> <p>II.6 Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam</p> <p>II.7 Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan</p>	<p>Manusia yang Berkompeten</p> <p>III.3 Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah</p> <p>III.6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan</p> <p>III.7 Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta penguatan perlindungan anak</p>	<p>sumberdaya manusia yang berakhhlak mulia, unggul, dan berbudaya</p> <p>IV.5 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan</p>	

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Misi pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara			
	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		dalam berbagai aspek kehidupan		
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera	I.3 Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi	II.3 Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja II.4 Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata	III.4 Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah III. 5 Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah	IV.3 Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif IV.4 Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah

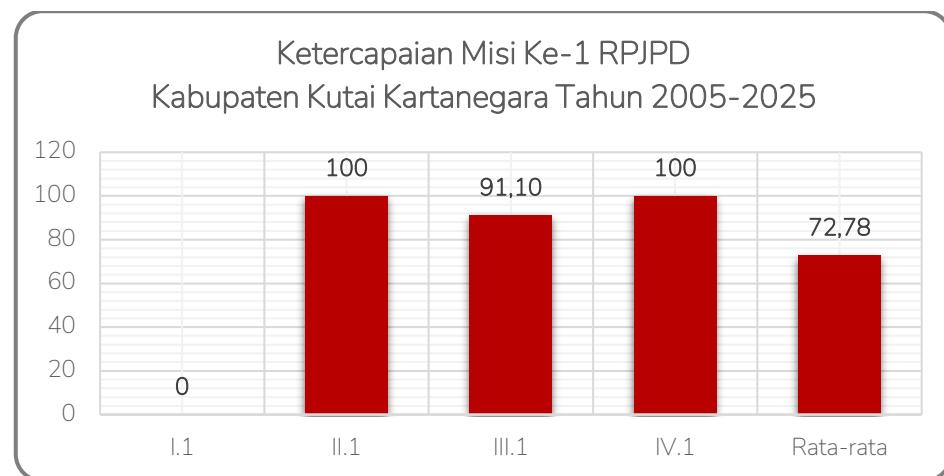
2.4.1 CAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)

Misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju". Ketercapaian pada misi tersebut diukur dengan melakukan penilaian pada misi-misi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi

kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan ketercapaian sebesar 72,78% atau berada pada predikat Sedang (Tabel 2.11).

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Misi Ke-1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Misi 1		
Kode Misi Tiap Periode RPJMD	Keterangan Misi	Ketercapaian (%)
I.1	Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum	0
II.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance	100
III.1	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	91,10
IV.1	Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani	100
RATA-RATA		72,78
PREDIKAT		SEDANG



Gambar 2. 5 Ketercapaian Misi Ke-1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Ketercapaian misi pertama pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 didukung oleh ketercapaian pada berbagai misi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode satu hingga empat. Misi pertama pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode pertama serta misi pertama pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode keempat memiliki ketercapaian hingga 100%. Misi-misi tersebut sangat menyokong ketercapaian pada misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Dengan demikian, ketercapaian kinerja misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 secara keseluruhan memiliki predikat sedang.

2.4.2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)

Misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri". Ketercapaian pada misi tersebut diukur dengan melakukan penilaian pada misi-misi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi kedua RPJP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan ketercapaian sebesar 96,93% atau berada pada predikat Sangat Tinggi (Tabel 2.12).

Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Misi Ke-2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2026

Misi 2		
Kode Misi Tiap Periode RPJMD	Keterangan Misi	Ketercapaian (%)
I.2	Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi	97,44
II.2	Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	90,75

Misi 2		
Kode Misi Tiap Periode RPJMD	Keterangan Misi	Ketercapaian (%)
II.5	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas	100
II.6	Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam	100
II.7	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan	100
III.2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten	90,83
III.3	Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah	100
III.6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	96,45
III.7	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta penguatan perlindungan anak	98,22
IV.2	Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berakhhlak mulia, unggul, dan berbudaya	99,23
IV.5	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	93,35
RATA-RATA		96,93
PREDIKAT		SANGAT TINGGI



Gambar 2. 6 Ketercapaian Misi Ke- 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Ketercapaian misi kedua pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 didukung oleh ketercapaian pada berbagai misi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode satu hingga empat. Misi kelima, misi keenam, dan misi ketujuh pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode kedua serta misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode ketiga memiliki ketercapaian hingga 100%. Misi-misi tersebut sangat menyokong ketercapaian pada misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Belum lagi misi lain pada berbagai periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki ketercapaian lebih dari 90%. Dengan demikian, ketercapaian kinerja misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 secara keseluruhan memiliki predikat sangat tinggi.

2.4.3 CAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA)

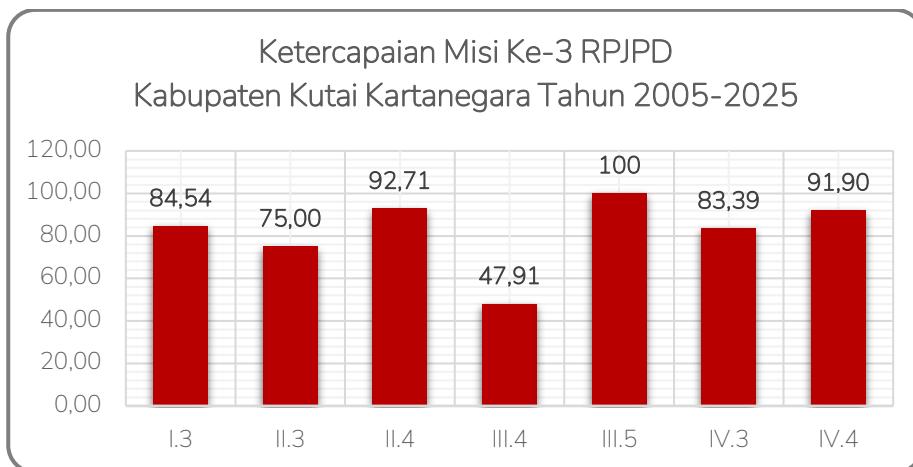
Misi ketiga yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri". Ketercapaian pada misi tersebut diukur dengan melakukan penilaian pada misi-misi RPJMD selama empat periode yang memiliki keterkaitan dengan misi ketiga RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005- 2025, yaitu misi I.3, II.3, II.4, III.4, III.5, IV.3, dan IV.4 (Tabel 2.13). Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi 3 RPJPD

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan nilai sebesar 82,21% atau berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Misi 3		
Kode Misi Tiap Periode RPJMD	Keterangan Misi	Ketercapaian (%)
I.3	Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi	84,54
II.3	Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja	75
II.4	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata	92,71
III.4	Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	47,91
III.5	Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah	100
IV.3	Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif	83,39
IV.4	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah	91,90

Misi 3		
Kode Misi Tiap Periode RPJMD	Keterangan Misi	Ketercapaian (%)
RATA-RATA		82,21
PREDIKAT		TINGGI



Gambar 2. 7 Ketercapaian Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Gambar 2.7 memperlihatkan ketercapaian misi-misi tiap periode RPJMD yang bersesuaian dengan misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Misi-misi periode RPJMD yang telah mencapai angka 100% adalah misi III.5. Misi III.5 berkaitan dengan peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah terutama dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada ketercapaian misi tersebut telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, terdapat beberapa misi RPJMD yang memiliki ketercapaian yang masih tergolong sedang, yaitu misi II.3 sebesar 75% dan sangat rendah, yaitu misi III.4 sebesar 47,91%. Misi RPJMD II.3 berkaitan dengan penumbuhan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja sedangkan misi RPJMD III.4

berkaitan dengan peningkatan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah. Dalam hal ini tentunya menjadi sebuah masukan yang baik untuk perencanaan pada periode selanjutnya agar mampu mengakomodasi pembangunan dan pengembangan sentra perekonomian, usaha rakyat, serta pengelolaan pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.5 EVALUASI CAPAIAN VISI RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2005-2025

Proses evaluasi di samping dilakukan berdasarkan capaian pada setiap RPJMD pada 4 (empat) periode, evaluasi ini secara langsung dilakukan terhadap capaian setiap misi yang merupakan penjabaran pada visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Terdapat tiga kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan ini yaitu mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pertanyaannya, bagaimana secara umum tiga kondisi tersebut dapat terjawab dalam evaluasi ini. Oleh karena itu, pada sub bab ini, secara umum cita-cita kondisi tersebut akan dijawab secara umum.

Tiga kondisi yang diharapkan dicapai dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijabarkan dengan pendekatan indikator sebagai berikut. Upaya mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang maju dapat dinilai dari pendekatan indeks reformasi birokrasi (IRB). Indikator tersebut akan menunjukkan kondisi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbeda dengan upaya dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri, kemandirian yang dimaksud dapat dilihat dari kemandirian secara keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dibandingkan dana transfer, maka semakin mandiri wilayah ini dan semakin meningkatnya rasio sektor non-tambang pada PDRB Kabupaten

Kutai Kartanegara. Kemudian kemandirian ini dapat di dekati dengan kondisi semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari indikator Pembangunan manusia (IPM dan IPG). Kondisi ketiga yaitu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum. Pendekatan indikator yang dapat digunakan adalah dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomian daerah yang dapat dilihat pada indikator Laju Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya distribusi pendapatan di masyarakat yang terlihat dari tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.

Kondisi yang dihasilkan pada tahun evaluasi ini, menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi (IRB) Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai angka 62,74 yang berada pada kategori B pada tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaksanakan kegiatan yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Kondisi yang dihasilkan dalam pencapaian kemandirian dapat dilihat dari Proporsi PAD dalam Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rasio Sektor Non-Tambang pada PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat selama kurun waktu dua dekade. Kondisi ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sendiri berhasil dilaksanakan, melalui kemampuan dalam merealisasikan potensi ekonomi yang ada pada daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2022 terus mengalami

peningkatan. Tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat klasifikasinya menjadi “Tinggi” sampai dengan sekarang.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Gender atau IPG, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mencapai angka 79,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik dalam mengevaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan. IPG tersebut menunjukkan bahwa sudah sebesar 79,80% perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, keputusan politik, dan partisipasi ekonomi.

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2005 sampai dengan 2022 menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai r yang mencapai 39,70%. Kenaikan tren keempat periode dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan strategi output perekonomian yang positif.

Nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari sektor pertanian mengalami tren penurunan dari tahun 2005 hingga tahun 2022. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai r yang mencapai angka -60,27%. Diperlukan berbagai upaya di sektor pertanian agar mampu mengatasi angka laju pertumbuhan ini, seperti mengidentifikasi penyebab penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut bisa melibatkan stimulus ekonomi, pengembangan kebijakan yang mendukung pertanian, peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

Berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata yang menunjukkan tren naik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai r yang mencapai 2,77%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami pertumbuhan dan

memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun selama kurun waktu 2 dekade kondisinya berfluktuatif namun secara tren terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2005 tingkat pengangguran terbuka masih pada posisi 10,12 namun pada akhir periode RPJPD mencapai angka 4,14, angka ini lebih rendah pada angka tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama. Membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional serta semakin beragamnya program perluasan lapangan pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memberikan andil dalam pencapaian target.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sempat mengalami fase penurunan yang tajam di awal periode dari 14,72 persen di tahun 2005 menjadi 8,03 persen di tahun 2009. Kenaikan sempat terjadi di tahun 2010, namun setelah itu kembali turun hingga tahun 2012. Periode 2012-2015 tingkat kemiskinan di Kutai Kartanegara cenderung naik dari 6,95 persen (2012) hingga 7,99 persen (2015). Tingkat kemiskinan kembali turun hingga pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan di tahun 2020 dan tahun 2021. Tingkat kemiskinan di Tahun 2021 mencapai 7,99 persen, setara dengan tingkat kemiskinan di Tahun 2015. Dampak dari pandemi Covid-19 menjadikan seolah-olah penurunan kemiskinan selama enam tahun menjadi sia-sia. Kondisi kemiskinan ini terus menjadi fokus pemerintah kabupaten karena tingkat penurunannya di tahun 2022 tidak signifikan. Lebih detail capaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2. 14 Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	Indikator	Angka Capaian Kinerja		
			2005	2022	r (%)
1	Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju	Indeks Reformasi Birokrasi	-	62,74	-
2	Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri	Proporsi PAD dalam Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	1,8%	8,8%	388,89%
		Rasio Sektor Non- Tambang pada PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara	23,33	29,33	25,72%
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,27	74,67	4,77%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	79,80	-
3	Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera	LPE	2.67	3.73	39.70%
		LPE Pertanian	4,80%	1,91%	-60,27%
		LPE Pariwisata	6,41%	6,59%	2,77%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,12	4,14	-59,09%
		Kemiskinan	14.72	7,96	-45,92%

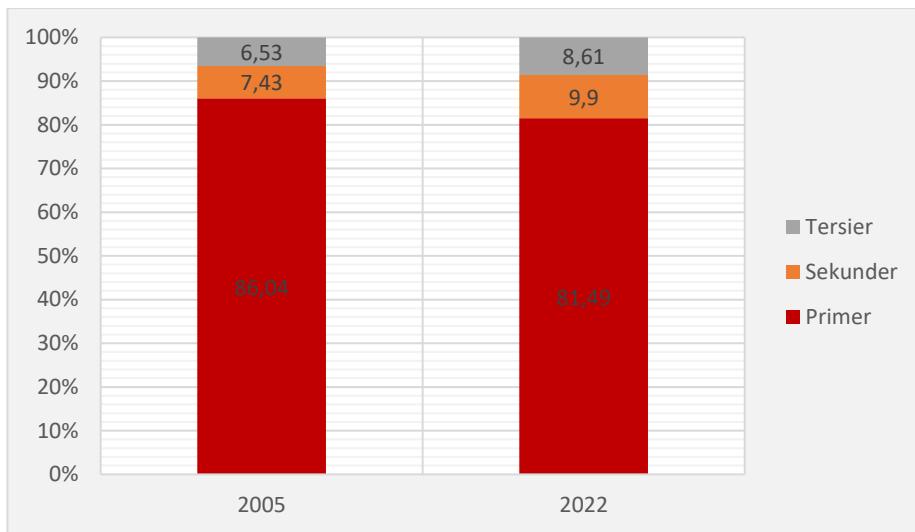
2.5.1 TRANSFORMASI EKONOMI

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi PDRB secara sektoral. Distribusi PDRB secara sektoral menunjukkan besarnya peranan setiap lapangan usaha terhadap nilai PDRB secara keseluruhan. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar

menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, besarnya potensi sumberdaya di suatu wilayah akan turut menentukan struktur atau corak ekonomi wilayah tersebut. Dengan mengamati distribusi PDRB antar waktu, kita dapat melihat pergeseran struktur ekonomi sebuah wilayah.

Besarnya nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun, yang dicerminkan oleh besaran PDRB, tidak terlepas dari melimpahnya cadangan sumber daya alam di beberapa wilayah, baik minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun kelapa sawit. Melimpahnya sumber daya alam ini kemudian menjadikan sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan bagian dari sektor primer, sebagai sektor dominan di Kutai Kartanegara. Sektor primer adalah sektor-sektor ekonomi yang kegiatan utamanya dilakukan dengan mengekstraksi sumber daya dari alam, seperti kegiatan pertanian, pertambangan, dan penggalian.

Sepanjang periode RPJPD (2005-2025) struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor primer, yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori pertambangan dan penggalian. Secara total, sektor primer ini rata-rata menyumbang lebih dari 80 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara sektor sekunder, yang terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air dan pengelolaan sampah; serta konstruksi hanya menyumbang sekitar 7-9 persen terhadap total perekonomian Kutai Kartanegara. Sedangkan sektor tersier atau sektor jasa, yang terdiri dari berbagai lapangan usaha jasa seperti perdagangan; transportasi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; jasa pendidikan; jasa kesehatan; serta jasa lainnya, secara rata-rata menyumbang sekitar 6-8 persen terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkembangan kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.8, peranan ketiga sektor ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mulai mengalami perubahan. Dominasi sektor primer (dominasi migas dan batubara) semakin menurun dengan kontribusi sebesar 86,04 persen pada tahun 2005 menjadi 81,49 persen pada tahun 2022. Sebagai gantinya, sektor sekunder dan tersier mulai berkembang pada sepanjang tahun 2005-2022. Pada tahun 2005, kontribusi sektor sekunder tercatat sebesar 7,43 persen. Kontribusi sektor ini kemudian mulai meningkat menjadi 9,9 persen. Sementara itu, kontribusi sektor tersier mengalami perkembangan pesat menjadi 8,61 persen pada tahun 2022 dibandingkan kontribusi sebesar 6,53 persen pada tahun 2005. Berdasarkan data tersebut, maka telah terjadi pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier walaupun tingkat pergeserannya masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor primer yang semakin menurun dengan pertumbuhan yang relatif rendah, sementara pada saat yang sama kontribusi sektor sekunder meningkat dengan pertumbuhan yang relatif kecil dan sektor tersier terlihat semakin meningkat dengan pertumbuhan yang relatif tinggi.

Adapun analisis terhadap sektor-sektor lapangan usaha dominan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada sektor lapangan usaha non tambang. Peningkatan kontribusi sektor non tambang pada total PDRB

juga didukung oleh laju peningkatan kontribusi yang tinggi khususnya pada sektor lapangan usaha industri pengolahan dan jasa.

Tabel 2. 15 Perkembangan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa Terhadap Total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sektor Lapangan Usaha	2005	2022	R (%)
1	Pertanian	9,37	10,72	14,41
2	Pertambangan dan Penggalian	76,67	70,77	-7,70
3	Industri Pengolahan	2,31	3,48	50,65
4	Jasa-jasa	1,46	2,20	50,68

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.15, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan signifikan dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 76,67 persen di tahun 2005 turun hingga 70,77 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 7,70 persen. Sementara itu ketiga sektor lain mengalami peningkatan signifikan, yaitu sektor pertanian mengalami peningkatan kontribusi sebesar 14,41 persen dengan capaian kontribusi terhadap total PDRB sebesar 9,37 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 10,72 persen pada tahun 2022. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan hingga 50,65 persen dengan kontribusi di tahun 2005 sebesar 2,31 persen meningkat hingga 3,48 persen di tahun 2022. Adapun sektor jasa mengalami peningkatan dari capaian kontribusi sebesar 1,46 persen di tahun 2005 menjadi 2,20 persen di tahun 2022 atau mengalami peningkatan hingga 50,68 persen. Perubahan kontribusi PDRB ADHB selama tahun 2005-2022 menunjukkan bahwa dominasi struktur perekonomian Kutai Kartanegara sudah mulai bergeser, dari sektor ekonomi yang bersifat ekstraktif menuju sektor ekonomi produksi dan jasa.

Untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi pemicu pertumbuhan, metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian yang mengarah pada identifikasi spesialisasi/basis kegiatan

perekonomian. Nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Adapun perhitungan nilai LQ pada beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjukkan pada Tabel 2.16 berikut:

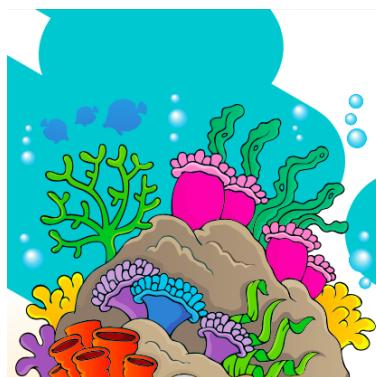
Tabel 2. 16 Analisis LQ Sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Miliar Rupiah)

Sektor	2005			2025		
	Nilai PDRB Kutai Kartanegara	Nilai PDRB Kalimantan Timur	LQ	Nilai PDRB Kutai Kartanegara	Nilai PDRB Kalimantan Timur	LQ
Pertanian	3.176,92	9.535,87	1,77	22.777,34	64.891,73	1,35
Pertambangan dan Penggalian	26.006,22	76.699,23	1,80	170.131,42	490.501,12	1,33
Industri Pengolahan	785,25	65.988,81	0,06	8.359,46	138.636,14	0,23
Jasa-jasa	495,66	3.967,56	0,66	5.289,46	39.818,56	0,51
Total PDRB	33.920,30	180.254,09		240.402,39	921.332,98	

Berdasarkan analisis LQ menunjukkan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai $LQ > 1$ baik pada tahun 2005 dan 2022 sehingga dikategorikan sebagai sektor basis dengan tingkat spesialisasi/basis sektor tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Pada periode yang sama, sektor industri pengolahan dan jasa yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap total PDRB memiliki nilai $LQ < 1$ sehingga dikategorikan sebagai sektor non basis. Akan tetapi nilai LQ khususnya pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu tersebut sehingga memiliki potensi untuk berkembangan menjadi salah satu sektor dominan dan basis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.6 PREDIKAT KINERJA RPJPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2005-2025

Predikat kinerja pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari hasil agregasi dari capaian ketiga misi yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Hasil agregasi tersebut akan memunculkan rata-rata nilai capaian kinerja selama dua puluh tahun pembangunan. Nilai capaian tersebut yang kemudian dapat dilakukan predikat kinerja. Klasifikasi predikat kinerja tersebut berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Adapun klasifikasi predikat yang dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

PREDIKAT KINERJA

arya.radestya@gmail.com

Gambar 2. 9 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023

Sumber: Radestya, R.A., 2023

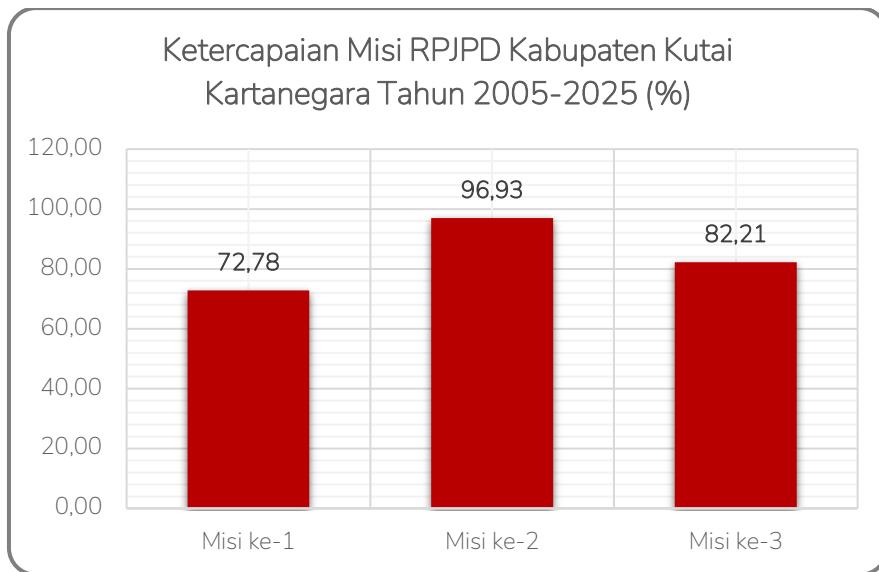
Hasil evaluasi kinerja pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 berdasarkan proses agregasi per misi RPJPD didapatkan bahwa capaian nilai total kinerja RPJPD sebesar 83,97%. Angka tersebut menandakan bahwa kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam predikat TINGGI.

Angka capaian kinerja ini sangat dekat dengan kelas sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun masuk kedalam kelas kinerja nomor dua, akan tetapi nilai yang didapatkan tergolong mendekati kelas pertama.

Tabel 2. 17 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

CAPAIAN KINERJA VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB KUTAI KARTANEGERA 2005-2025	83,97
PREDIKAT KINERJA	TINGGI

Di samping itu, kontribusi perolehan angka kinerja total pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ini diperoleh dari kontribusi masing-masing misi. Terdapat tiga misi dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Misi pertama dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju lebih banyak dikaitkan dengan *pelayanan tata pemerintahan yang baik*. Sedangkan misi kedua dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri lebih ditekankan pada *kemandirian dalam pengembangan SDM, pengelolaan sumberdaya alam, serta pembiayaan keuangan daerah*. Misi ketiga dengan narasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera ditandai dengan *peningkatan perekonomian lokal masyarakat*. Hasil evaluasi diketahui bahwa nilai tertinggi berada pada misi 2 (dua). Terkait kemandirian dari pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan misi yang masih perlu menjadi perhatian lebih adalah terkait dengan misi pertama yang mengarah pada tata pemerintahan. Lebih detail dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2. 10 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

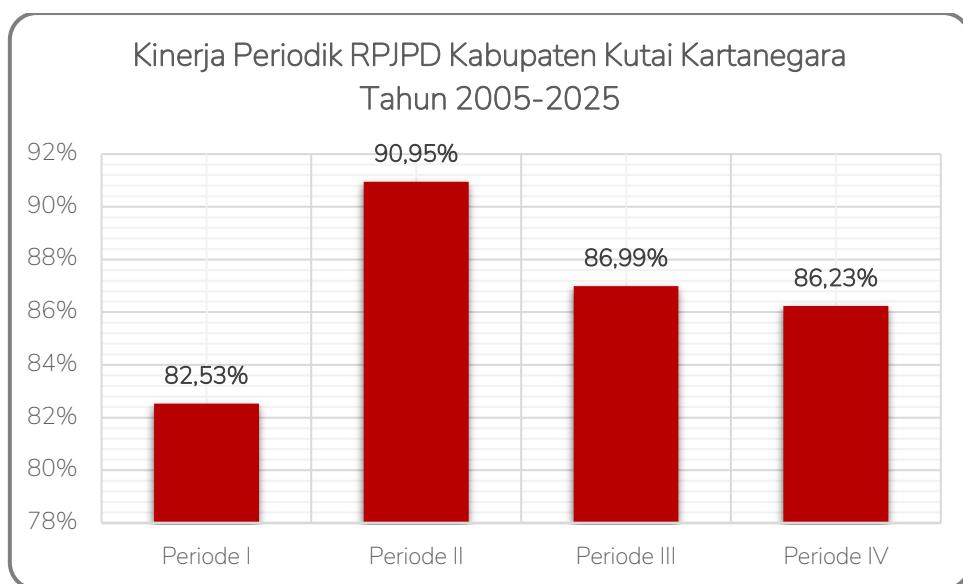
Nilai misi pertama yang cukup rendah dikarenakan capaian kinerja salah satu indikator pada periode pertama (tahun 2005-2010) dipengaruhi oleh keberadaan opini BPK. Pada akhir periode, terdapat target opini BPK berupa Wajar dengan Pengecualian (WDP), akan tetapi hasil yang didapat adalah *disclaimer of opinion* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini menjadikan target sama sekali tidak terpenuhi atau jika dikuantifikasi menjadi 0%. Berdasarkan evaluasi di atas kemudian nilai capaian pada misi pertama memiliki predikat SEDANG. Adapun ketercapaian setiap misi berdasarkan hasil agragasi dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2. 18 Angka Capaian Kinerja Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

MISI	NARASI MISI	TINGKAT KETERCAPAIAN
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju	72,78
2	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri	96,93

MISI	NARASI MISI	TINGKAT KETERCAPAIAN
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera	82,21

Nilai capaian yang masih tergolong predikat SEDANG pada misi pertama banyak dipengaruhi oleh capaian kinerja pada masa pemerintahan periode pertama. Hal ini selaras dengan angka capaian penilaian per masing-masing periode RPJMD. Jika dilihat pada gambar dibawah ini, capaian terendah didapatkan pada periode pertama, sedangkan periode kedua memiliki angka tertinggi. Catatan yang perlu diberikan adalah capaian yang periode pemerintah saat ini dapatkan. Masih menyentuh angka 86,23% selama dua tahun ini. Perlu peningkatan kinerja yang signifikan agar pencapaian target dapat dilakukan.



Gambar 2. 11 Kinerja Pembangunan Jangka Panjang pada Setiap Periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Tahun 2005-2025

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong menjadi sebuah parameter yang berpengaruh dalam mewujudkan target capaian kinerja dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2026 atau selama jangka waktu dua puluh tahun proses pembangunan. Identifikasi faktor pendorong dilakukan pada masing-masing sasaran pokok pada tiap misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Urgensi pemetaan faktor pendorong ini adalah upaya dalam mempelajari keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan penciptaan situasi kerja yang baik dalam periode pembangunan dua puluh tahunan berikutnya. Berbagai faktor pendorong yang telah dipetakan tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai isu strategis dalam periode RPJPD berikutnya.

Pembahasan tentang faktor pendorong tercapainya target pada tiap misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 dapat terbagi ke dalam sub-bab pada masing-masing misi. Hal ini dikarenakan, arah pembangunan RPJPD termuat dalam dalam visi pembangunan, dan pengelompokan sektor yang dimaksud dalam visi, kemudian tertuang dalam setiap misi. Oleh karena itu, dalam menganalisis faktor pendorong juga dilakukan pemetaan pada masing-masing misi tetapi, faktor pendorong pada setiap misi didalamnya terdiri dari beberapa tujuan dan sasaran. Selanjutnya, masing-masing sub cluster tersebut dipetakan pula faktor pendorong pencapaian targetnya.

3.1.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)

Misi pertama dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju". Misi

tersebut telah berhasil dicapai dengan tingkat ketercapaian sebesar 72,78%. Nilai tersebut masih tergolong pada kriteria penilaian tingkat sedang. Meskipun misi pertama masih berada pada kriteria penilaian tingkat sedang, ketercapaian tersebut didukung oleh berbagai faktor, seperti telah terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan sehingga terwujud transparansi publik. Selain itu, telah terlaksananya reformasi struktur kelembagaan pemerintah daerah melalui penataan struktur organisasi juga turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan penyederhanaan alur birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan faktor pendorong pada misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
1	Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government	Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan sehingga terwujud transparansi publik
2	Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh	Berkembangnya budaya politik dan munculnya kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis melalui penghormatan nilai-nilai HAM, nilai persamaan, anti kekerasan, serta toleransi
3	Memperkuat peranan masyarakat sipil	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan salah satunya melalui musrenbang dan penguatan pengawasan publik

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
4	Peningkatan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal	Terlaksananya reformasi struktur kelembagaan pemerintah daerah melalui penataan struktur organisasi; Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; serta optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
5	Menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pemerataan informasi ke masyarakat dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen
6	Melakukan pemberahan struktur kelembagaan pemerintah daerah	Penyempurnaan distribusi kewenangan kelembagaan dan penataan struktur organisasi
7	Peningkatan kualitas layanan publik	Meningkatnya kapasitas SDM dan munculnya inovasi daerah untuk efektivitas pelayan publik yang mudah diakses masyarakat; Terlaksananya reformasi birokrasi dan penyederhanaan alur birokrasi sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik
8	Peningkatan budaya tertib hukum	Penyebarluasan informasi terkait regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai regulasi yang berlaku

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
9	Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil	Terjaminnya penegakan hukum dan peningkatan keikutsertaan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

3.1.2 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)

Misi kedua dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri". Misi tersebut telah berhasil dicapai dengan tingkat ketercapaian sebesar 96,93%. Nilai tersebut yang sudah termasuk kategori sangat tinggi. Ketercapaian tersebut didukung oleh berbagai faktor, seperti adanya komitmen dari pemerintah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar dan energi masyarakat. Selain itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terdapat berbagai program pembangunan yang dikhkususkan untuk peningkatan kapasitas SDM terutama dalam hal pendidikan dan penguasaan IPTEK. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan faktor pendorong pada misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
1	Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan didukung dengan adanya Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
		tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
2	Peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	Melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan pada daerah yang terisolasi, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, serta pembangunan jaringan air bersih desa. Selain itu, Pemerintah Daerah telah melakukan pemenuhan alokasi dana pada bidang perhubungan
3	Peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	Adanya pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik sebagai sumber energi bagi masyarakat.
4	Peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara terencana dan berupa kegiatan <i>multiyears</i> serta menggunakan bahan berkualitas yang baik.
5	Peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	Didorong dengan adanya identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, adanya pernyataan dan penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah. Selain itu, terdapat penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah serta adanya

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
		monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
6	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<p>Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat setempat juga mulai sadar akan gizi dan penerapan pola hidup sehat.</p> <p>Pada bidang lingkungan hidup, dilakukan pengembangan pelaksanaan AMDAL bagi perusahaan yang berdampak besar dan penting serta pengembangan UKL/UPL bagi perusahaan-perusahaan yang tidak wajib AMDAL. Selain itu, dilakukan pula keterlibatan masyarakat dalam dokumen AMDAL.</p>
7	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan IPTEK	Adanya pemenuhan lembaga pendidikan tiap jenjang pada setiap desa. Selain itu, dalam menangani angka putus sekolah didirikan sanggar kegiatan belajar (SKB). Pemerintah juga mengupayakan adanya pembebasan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa bagi para murid dan mahasiswa.
8	Pengoptimalan pemeliharaan dan	Adanya program konservasi untuk melestarikan lingkungan hidup, seperti

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
	pemanfaatan keanekaragaman hayati	adanya program rehabilitasi hutan dan lahan
9	Mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	Mempersiapkan tenaga kerja yang telah dimiliki daerah, membuka kesempatan bagi penduduk untuk berkreasi didukung dengan kemajuan teknologi yang dimiliki. Selain itu, telah tersedianya sarana prasarana dalam menjalankan usaha yang mendorong peningkatan pertumbuhan investasi.
10	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan	Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan. Hal ini juga didukung dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kaya akan sumber daya alam.

3.1.3 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA)

Misi ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera". Misi tersebut telah berhasil dicapai dengan tingkat ketercapaian sebesar 83,25%. Nilai tersebut yang sudah termasuk kategori tinggi. Ketercapaian tersebut didukung oleh berbagai faktor, seperti program-program pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta

sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah ini ditempuh agar dapat meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan faktor pendorong pada misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Penilaian Faktor Pendorong Pencapaian Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan	Adanya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta penggalian terkait potensi pajak dan retribusi yang sesuai dengan regulasi didukung dengan semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya.
2	Peningkatan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
3	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perkebunan	Produksi sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
4	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata.

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
5	Peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	Kesadaran akan kesenjangan sosial yang didukung dengan kebijakan pemerintah yang inklusif dan partisipasi masyarakat yang aktif.
6	Peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa dalam rangka pembentukkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Keberadaan sumber daya alam, manusia, dan budaya yang khas menjadi pendorong untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, keberadaan masyarakat yang memiliki keterampilan dan kearifan lokal juga dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis lokal.
7	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke pedesaan	Pembangunan infrastruktur yang mulai digalakkan untuk mendukung aksesibilitas wilayah dan sebagai upaya pemerataan pembangunan.
8	Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas pertanian didukung dengan penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit, serta diversifikasi tanaman.

No	Sasaran pokok	Faktor Pendorong
9	Mengembangkan jiwa kewirausahaan	Ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki didukung dengan terbukanya kesempatan bagi mereka untuk berkreasi serta adanya kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudahan dalam akses komunikasi, terutama perkembangan media sosial.
10	Peningkatan ketersediaan pasokan energi	Adanya upaya untuk turut mengembangkan energi terbarukan serta upaya penghematan energi tidak terbarukan.

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor penghambat yang dimaksud dalam bagian ini merujuk pada usaha untuk mengevaluasi berbagai kendala yang muncul selama proses pembangunan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berbagai kendala akan muncul sebagai bagian dari dinamika yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pandemi Covid-19 merupakan krisis yang sangat sulit bagi pemerintah untuk konsisten dalam mencapai target pembangunan. Krisis tersebut dapat disebut sebagai salah satu faktor penghambat, di samping beberapa kondisi lain yang terjadi selama dua puluh tahun pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, penjelasan rinci mengenai faktor penghambat dalam mencapai target kinerja akan diuraikan dalam beberapa bagian berikutnya.

3.2.1 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 1 (SATU)

Misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju" telah mencapai tingkat ketercapaian sebesar 72,78% atau termasuk kategori sedang. Namun demikian, meskipun ketercapaian tersebut sudah cenderung baik, masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan ketercapaian misi tersebut belum mampu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Faktor penghambat tersebut, seperti diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip *good governance*, rendahnya kebebasan pers, rendahnya integritas penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masih rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih rendah. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dan memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju. Penjelasan lebih lanjut terkait faktor penghambat pencapaian target pada misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 1 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
1	Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government	Kurangnya pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> ; Fasilitas yang kurang memadai. Ketersediaan fasilitas yang memadai mendorong keterjangkauan administrasi publik dan pelayanan masyarakat.
2	Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh	Rendahnya kebebasan pers; Rendahnya partisipasi politik disebabkan kurangnya kesadaran politik

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
		menghambat pengembangan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan mendorong kegagalan implementasi demokrasi.
3	Memperkuat peranan masyarakat sipil	Kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah; Peran pemerintah daerah yang terlalu dominan sehingga masyarakat terkesan pasif
4	Peningkatan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal	Masih bergantung pada dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) dengan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kurangnya inovasi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber penerimaan daerah
5	Menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat	Sulitnya menghimpun informasi yang kredibel dan pembatasan penyebaran informasi publik. Dukungan informasi yang jujur dan berimbang mendorong penguatan demokrasi.
6	Melakukan pemberahan struktur kelembagaan pemerintah daerah	Kurangnya komitmen pimpinan sebagai garda terdepan dalam reformasi birokrasi dan menjadi teladan dengan menentukan arah dan konsep reformasi
7	Peningkatan kualitas layanan publik	Budaya birokrasi yang masih hierarkis dan struktural sehingga menghasilkan

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
		pelayanan yang kurang responsif dan lamban
8	Peningkatan budaya tertib hukum	Rendahnya integritas penegak hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk korupsi di dalam aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya, atau ketidakmampuan sistem peradilan, menghambat upaya untuk mempertahankan keamanan masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang berwenang
9	Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil	Ketimpangan ekonomi dan tingkat pengangguran tinggi, atau ketidaksetaraan sosial menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Ketidakadilan sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial, yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Terjadinya fragmentasi sosial memicu ketidakpercayaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

3.2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 2 (DUA)

Misi kedua RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri" telah mencapai tingkat ketercapaian sebesar 96,93%, atau sudah termasuk pada kategori sangat tinggi. Namun demikian, meskipun ketercapaian tersebut sudah termasuk sangat tinggi, masih terdapat faktor yang menghambat ketercapaian kinerja misi 2 RPJPD tersebut. Faktor penghambat tersebut, seperti di antaranya adalah penggunaan sumberdaya anggaran untuk mewujudkan program-program peningkatan partisipasi masyarakat masih belum efisien, pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan energi masyarakat terkendala karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terlalu luas sehingga menghambat pemerataan pembangunan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga masih rendah dan juga masih banyak penduduk yang lebih mementingkan pekerjaan untuk mencari uang dari pada pendidikan juga turut menjadi faktor penghambat ketercapaian misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjelasan lebih lanjut terkait faktor penghambat pencapaian target pada misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tersaji pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	Kurang efisienya penggunaan sumber daya anggaran untuk mewujudkan program-program peningkatan partisipasi masyarakat terutama adalah program perwujudan pemberdayaan gender. Selain itu, masih terdapat pula diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja.

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
2	Peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terlalu luas sehingga menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni.
3	Peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terduga sehingga menghambat dalam penyaluran energi untuk masyarakat dan dunia usaha
4	Peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	Ditemukannya faktor alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
5	Peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	Belum memadainya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, cepatnya perubahan yang terjadi dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah sehingga seringkali daerah kurang responsif dalam mengantisipasi perubahan tersebut serta kurangnya koordinasi vertikal maupun horizontal dalam pengelolaan keuangan daerah
6	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;	Kondisi geografis menjadi penghambat yang menyebabkan pelayanan kesehatan

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<p>masyarakat sulit untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, sarana prasarana kesehatan maupun SDM kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan Masyarakat yang belum memadai.</p> <p>Dalam bidang kualitas lingkungan hidup, terdapat adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya tutupan lahan</p>
7	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan IPTEK	Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
8	Pengoptimalan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara keanekaragam hayati yang masih kurang dengan masih adanya kasus-kasus perburuan liar
9	Mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	Salah satu sektor yang dapat menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor pertanian masih dianggap memiliki potensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor pertambangan. Selain itu, regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
		rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tuan dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.
10	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan	Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia

3.2.3 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA MISI 3 (TIGA)

Misi ketiga yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera" telah mencapai tingkat ketercapaian sebesar 83,25%, yang termasuk kategori tinggi. Namun demikian, meskipun ketercapaian tersebut sudah baik, masih terdapat faktor penghambat, seperti pandemi Covid-19, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat, serta alih fungsi lahan mampu yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi tersebut secara keseluruhan. Upaya penanganan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dan memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara benar-benar mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.

Tabel 3. 6 Penilaian Faktor Penghambat Pencapaian Misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan	Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi besarnya pendapatan terutama untuk kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan tetap.
2	Peningkatan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan	Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan.
3	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perkebunan	Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan.
4	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berimbas pada sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5	Peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan	Kurangnya pemahaman akan perlunya tindakan yang berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi

No	Sasaran pokok	Faktor Penghambat
	mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	ketimpangan sosial dapat menghambat upaya peningkatan keberpihakan.
6	Peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa dalam rangka pembentukkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan.
7	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke pedesaan	Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
8	Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	Sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum mendapat perhatian yang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh masih rendah.
9	Mengembangkan jiwa kewirausahaan	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wirausaha serta peluang yang kurang bisa dimanfaatkan.
10	Peningkatan ketersediaan pasokan energi	Belum optimalnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan energi yang ada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1 KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 dapat termuat kesimpulan umum sebagai berikut ini:

- 1) Proses evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 dilakukan dengan metode kualitatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1./1570/SJ Tahun 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 2) Capaian kinerja pembangunan jangka panjang pada setiap periode RPJMD selama tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa nilai tertinggi dicapai pada periode pemerintahan periode kedua yaitu tahun 2011-2015. Sedangkan nilai terendah dicapai pada periode pertama yaitu tahun 2005-2010.
- 3) Peningkatan capaian kinerja perlu dilakukan terhadap masa pemerintahan periode keempat saat ini yaitu tahun 2021-2026. Angka capaian kinerja selama dua tahun berjalan yaitu 2021 sampai 2022 menunjukkan nilai 86,23%. Artinya masih perlu upaya peningkatan agar kinerja tahunan dapat mencapai nilai rata-rata yang sangat tinggi di atas 90%.
- 4) Capaian kinerja pembangunan jangka panjang pada konteks capaian ketiga misi RPJPD menunjukkan bahwa misi pertama memiliki nilai capaian terendah dikarenakan kinerja sektor pemerintahan yang didapatkan pada periode pertama tahun 2005-2010. Capaian tertinggi berada pada misi kedua tentang kemandirian.
- 5) Pada akhirnya, predikat kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 mendapatkan nilai 83,97% atau termasuk dalam predikat TINGGI.

- 6) Faktor pendorong yang dapat disimpulkan dari capaian kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah keberadaan partisipasi masyarakat yang tinggi serta fokus dalam pencapaian target pembangunan yang telah didapatkan pada setiap OPD yang ada pada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 7) Faktor penghambat yang dapat dipetakan dalam pencapaian kinerja jangka panjang ini adalah ketidaksamaan pola kinerja antar periode pemerintahan lima tahunan. Pada akhirnya mempengaruhi capaian per masing-masing periode.

Di samping kesimpulan umum, terdapat uraian kesimpulan pada setiap capaian misi pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesimpulan capaian misi 1 “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju”

Misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju". Ketercapaian pada misi tersebut diukur dengan melakukan penilaian pada misi-misi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan misi pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi kedua RPJP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan ketercapaian sebesar 72,78% atau berada pada predikat Sedang.

Kondisi yang dihasilkan pada tahun evaluasi ini, menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi (IRB) Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai angka 62,74 yang berada pada kategori B. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga pemerintahan telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi. Indeks ini

biasanya mencakup beberapa dimensi penting dalam reformasi birokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan, dan pelayanan publik.

Melalui pengukuran dan peringkat dalam Indeks Reformasi Birokrasi, lembaga pemerintahan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang keadaan birokrasi mereka dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi tersebut. Indeks Reformasi Birokrasi juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai dalam reformasi birokrasi. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang ada, pemerintah dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi juga dapat menjadi pembanding antara lembaga pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Hal ini dapat memotivasi persaingan sehat antara negara-negara atau lembaga-lembaga pemerintahan dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian, Indeks Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan dan perubahan positif dalam sistem birokrasi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Kesimpulan capaian misi 2 “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri”

Misi kedua yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mandiri". Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi 2 RPJPD Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan nilai sebesar 83,25% atau berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dari sisi kemandirian keuangan daerah pencapaian kemandirian keuangan daerah tergambar dari semakin meningkatnya Proporsi PAD dalam Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara serta Rasio Sektor Non-Tambang pada PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat selama kurun waktu dua dekade. Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang ada pada daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah menunjukkan kondisi yang semakin membaik.

Aspek kemandirian dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat sebesar 4,77% dari tahun 2005 hingga 2022

Dari sisi kesetaraan gender, kondisi pembangunan manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan gender (IPG), Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mencapai angka 79,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik dalam mengevaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan. IPG tersebut menunjukkan bahwa sudah sebesar 79,80% perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, keputusan politik, dan partisipasi ekonomi.

Kesimpulan capaian misi 3 “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera”

Misi ketiga yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah

"Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera". Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan ketercapaian misi 3 RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 menunjukkan nilai sebesar 82,21% atau berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2005-2022 tercatat berfluktuasi. Hal ini karena struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ditopang oleh aktivitas pertambangan (migas) dan penggalian (batubara). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak terlepas dari berfluktuasinya produksi migas dan batubara sebagai imbas bergejolaknya harga minyak mentah dan batubara di tingkat global. Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor primer, yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori pertambangan dan penggalian. Secara total, sektor primer ini rata-rata menyumbang lebih dari 80 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Peranan ketiga sektor ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mulai mengalami perubahan dengan terjadi pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier walaupun tingkat pergeserannya masih relatif kecil. Dominasi sektor primer (dominasi migas dan batubara) semakin menurun dengan kontribusi sebesar 86,04 persen pada tahun 2005 menjadi 81,49 persen pada tahun 2022. Sebagai gantinya, sektor sekunder dan tersier mulai berkembang pada sepanjang tahun 2005-2022.

Alih alih terus mengandalkan sektor pertambangan menjadi tumpuan perekonomian daerah yang cenderung memiliki resiko fluktuasi yang tinggi serta sangat dipengaruhi oleh gejolak eksternal perekonomian dunia, Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dihadapkan pada peluang untuk melanjutkan program transformasi ekonomi seiring dengan pembangunan wilayah Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Transformasi ekonomi Kutai Kartanegara merupakan proses mengubah struktur ekonomi yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor pertambangan menjadi lebih beragam

dan berkelanjutan. Tujuan dari transformasi ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sesuai dengan peluang yang ada, potensi ekonomi pada sektor pertanian dan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara harus diintegrasikan dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan wilayah IKN untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan Pertanian dalam artian luas yang mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi produk-produk pertanian. serta dicirikan dengan kompleksitas dan interkoneksi antara produksi pangan, pengelolaan sumber daya, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terlibat dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan. Luasnya wilayah pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan akan memiliki pasar yang pasti seiring dengan berkembangnya wilayah IKN.

Sektor potensial lain yang sangat penting dalam transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan adalah pengembangan sektor pariwisata. Keberadaan IKN Nusantara akan membuka peluang pengembangan potensi pariwisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan manusia melalui pengembangan objek daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangan sektor pariwisata ini harus dilaksanakan secara inklusif yang melibatkan seluas luasnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menciptakan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat.

Aspek kesejahteraan lainnya dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari tahun 2005 hingga 2022. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tren yang tidak berbeda jauh dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sempat mengalami fase penurunan yang tajam di awal periode (2005), kemudian berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga periode 2015. Tingkat kemiskinan kembali turun hingga pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan di tahun 2020 dan tahun 2021. Tingkat kemiskinan di Tahun 2021 mencapai 7,99 persen, setara dengan tingkat kemiskinan di Tahun 2015. Dampak dari pandemi Covid-19 menjadikan seolah-olah penurunan kemiskinan selama enam tahun menjadi sia-sia.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan dan perekonomian. Namun, terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperbaiki kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini akan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian yang memiliki potensi besar di wilayah tersebut. Pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengatasi tantangan dan mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Adapun rekomendasi umum tindak lanjut yang dimaksud tertuang sebagai berikut:

- 1) Diperlukan konsistensi tema pembangunan antara mandat dari dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD lima tahunan, sehingga penilaian antar misi pada masing-masing periode dapat saling terintegrasi.
- 2) Konsistensi kinerja masing-masing periode pemerintahan harus dapat dilakukan untuk kesesuaian dengan pemenuhan target yang telah ditetapkan baik pada RPJPD maupun target pada masing-masing RPJMD. Hal ini perlu ada penekanan pada setiap kinerja tim perencanaan dan tim monev pada setiap sektor.
- 3) Capaian kinerja pada periode 4 (tahun 2021-2026) ini perlu ditingkatkan, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- 4) Diperlukan apresiasi kepada beberapa sektor yang telah mencapai target kinerja jangka panjang, seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata serta diperlukan pencermatan ulang untuk sektor-sektor yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti sektor pemerintahan.

Secara khusus terdapat rekomendasi yang perlu menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan di periode berikutnya dengan fokus pada bidang reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan, bidang transformasi ekonomi serta bidang pengembangan sektor ekonomi unggulan,

Adapun rekomendasi tindak lanjut terkait dengan **bidang reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan** yaitu sebagai berikut:

Tantangan dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat meliputi kurangnya pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai, rendahnya kebebasan pers, rendahnya partisipasi politik karena kurangnya kesadaran politik, rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dominasi peran pemerintah daerah yang membuat masyarakat terkesan pasif, ketergantungan pada dana perimbangan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, kurangnya inovasi daerah dalam memanfaatkan

potensi lokal, kesulitan dalam menghimpun informasi yang kredibel dan pembatasan penyebaran informasi publik, kurangnya komitmen pimpinan dalam reformasi birokrasi, budaya birokrasi yang hirarkis dan struktural yang menghambat responsivitas pelayanan, rendahnya integritas penegak hukum dan kesadaran masyarakat, ketimpangan ekonomi dan tingkat pengangguran tinggi yang menciptakan ketegangan sosial, serta terjadinya fragmentasi sosial yang memicu ketidakpercayaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat, ada beberapa rekomendasi yang saling terkait. Pertama, meningkatkan pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip Good Governance melalui pelatihan dan pendidikan akan memberikan landasan yang kuat dalam memperbaiki kualitas administrasi publik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, memperbaiki fasilitas publik yang kurang memadai akan mendukung keterjangkauan administrasi publik dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, solusi terkait adalah peningkatan kebebasan pers dan partisipasi politik. Mengeliminasi pembatasan yang tidak perlu dan mempromosikan kebebasan berekspresi serta akses yang berimbang terhadap informasi akan mendukung pengembangan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat. Peningkatan partisipasi politik melalui program edukasi dan kampanye kesadaran politik juga akan membantu memperkuat demokrasi.

Kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga terkait erat dengan peningkatan partisipasi politik. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui reformasi pendidikan yang komprehensif, mereka akan lebih siap dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Selanjutnya, peran pemerintah daerah yang terlalu dominan dapat terkait dengan kurangnya partisipasi politik dan ketergantungan pada dana perimbangan. Diperlukan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan lokal untuk mengurangi dominasi pemerintah daerah dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang mempengaruhi mereka. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber penerimaan daerah akan memberikan kemandirian finansial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks informasi publik dan reformasi birokrasi, solusi terkait adalah memperbaiki pengumpulan informasi yang kredibel dan membatasi pembatasan penyebarluasan informasi. Dukungan informasi yang jujur dan berimbang akan mendorong penguatan demokrasi, sementara komitmen pimpinan dalam reformasi birokrasi akan menjadi teladan dan mengarahkan konsep reformasi secara keseluruhan. Di sisi lain, perlu mengubah budaya birokrasi yang masih hierarkis dan struktural agar pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif dan efisien.

Terakhir, integritas penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial dan ekonomi saling terkait. Peningkatan integritas penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat akan membantu memperkuat keamanan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap otoritas yang berwenang. Sementara itu, mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial akan mengurangi ketegangan dalam masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih stabil.

Ketika terjadi fragmentasi sosial, perlu ada upaya untuk memperbaiki percaya antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Melalui peningkatan partisipasi, pemberdayaan masyarakat, dan upaya dalam memperkuat keamanan dan keadilan, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dan masyarakat dapat berkembang secara lebih harmonis.

Adapun rekomendasi tindak lanjut terkait dengan **bidang transformasi ekonomi** yaitu sebagai berikut:

Peningkatan kesejahteraan daerah melalui pengembangan sektor unggulan daerah yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal merupakan salah satu upaya optimalisasi otonomi daerah. Dalam pembangunan kewilayahan harus diperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi baik migas maupun non migas dan semakin baiknya distribusi pendapatan diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun beberapa kali terkontraksi akibat situasi ekonomi global yang tidak menentu, secara umum perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa migas mampu tumbuh stabil. PDRB non migas mampu tumbuh lebih dominan sebesar 5,71 persen pada Tahun 2021. Selain itu, struktur ekonomi mulai bergeser pada sektor produksi dan sektor jasa dalam 20 tahun terakhir. Percepatan transformasi struktur ekonomi menuju sektor produksi dan jasa perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi gejolak ekonomi akibat perpindahan Ibu Kota Negara serta mengurangi ketergantungan PDRB terhadap sektor pertambangan diantaranya melalui peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.

Transformasi ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan melalui perubahan struktur, pola, dan kualitas ekonomi yang berbasis pertanian menjadi lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan dan pembangunan daerah. Strategi transformasi sektor pertanian diantaranya:

1. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekologi, pasar, dan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan investasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, penyimpanan, dan pengolahan;

3. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pertanian melalui peningkatan akses modal dan jejaring pemasaran;
4. Pengembangan agroindustri dan nilai tambah produk pertanian melalui diversifikasi, standardisasi, sertifikasi, dan branding; serta
5. Reformasi kebijakan dan regulasi pertanian yang mendukung transformasi seperti subsidi dan perlindungan petani demi peningkatan ketahanan pangan.

Adapun pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan asli daerah.

Beberapa strategi transformasi ekonomi sektor pariwisata antara lain:

1. Penerapan teknologi dan inovasi pariwisata yang sesuai dengan kondisi pasar, budaya, dan lingkungan;
2. Peningkatan investasi infrastruktur pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;
4. Pengembangan ekonomi kreatif yang terkait dengan pariwisata seperti kerajinan tangan, kuliner, seni, dan budaya; serta
5. Reformasi kebijakan dan regulasi pariwisata yang mendukung transformasi diantaranya pemasaran dan perlindungan wisatawan.

Akhirnya, transformasi ekonomi ini harus didukung oleh komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga lainnya. Tantangan dan perubahan mungkin terjadi selama proses transformasi, namun dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun rekomendasi tindak lanjut terkait dengan **bidang pengembangan sektor ekonomi unggulan** yaitu sebagai berikut:

Pengoptimalan potensi sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara mengintegrasikan dimensi hulu-hilir dalam pengembangan pertanian. Pengintegrasian dimensi hulu-hilir ini dilakukan dengan menerapkan konsep 5A yang terdiri atas Agroproduksi, Agroindustri, Agrobisnis, Agroteknologi, dan Agrowisata, sehingga produk-produk hasil pertanian dapat memiliki nilai lebih saat dipasarkan. Selain itu, pembangunan ekonomi kreatif juga dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kutai Kartanegara. Ekonomi kreatif memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan pariwisata dan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, ekonomi kreatif memiliki multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat Kutai Kartanegara untuk melakukan transformasi dari struktur ekonomi ekstraktif ke struktur ekonomi non ekstraktif. Harapannya, dampak luas pembangunan ekonomi kreatif dapat berperan bagi peningkatan pendapatan masyarakat, pelestarian seni budaya lokal, dan pemelihara keeratan hidup bermasyarakat di Kutai Kartanegara.

Dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulan juga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas karena sumber daya manusia berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, SDM yang ada diharapkan mampu berinovasi dan mengolah potensi yang ada secara optimal menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi.

.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I
Formulir 4. Capaian Indikator Kinerja Makro
Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2005-2025



Formulir 4. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2005-2022

No.	Indikator Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.27	74.67	4.77	Tahun 2005 menggunakan metode lama, Tahun 2022 menggunakan metode baru.
2	Angka Kemiskinan	14.72	7.96	(45.92)	
3	Angka Pengangguran	10.12	4.14	(59.09)	
4	Pertumbuhan Ekonomi	2.67	3.73	39.70	
5	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	0.29	0.269	(7.24)	
6	PDRB Per Kapita	113.64 juta	254.5 juta	123.95	

LAMPIRAN II

Formulir 5. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Periode Perencanaan	:	2005-2010		
Klaster Kebijakan (Misi)		Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum	Pemberdayaan seluruh komponen ekonom	Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi
Arah Kebijakan	:	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang baik, bersih, baik, bersih, bertanggung jawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi. Hal tersebut mampu dicapai apabila terjadi	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, diiringi dengan upaya mendorong	Pada periode ini diharapkan dapat tercipta masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mampu dicapai apabila terjadi peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan.

	<p>pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundang-undangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>).</p>	<p>usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources) kepada sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>). Hal tersebut mampu dicapai dengan cara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.</p>	
Uraian Pencapaian :	<p>Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundang-undangan), menjunjung</p>	<p>Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan pada laju pertumbuhan di berbagai sektor dan rasio gini. Peningkatan laju pertumbuhan</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan ditunjukkan dengan berbagai indeks, seperti IPM,</p>

	<p>kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>) pada kenyataannya belum bisa dicapai. Hal tersebut disebabkan karena realisasi opini BPK terhadap LKPD Kutai Kartanegara yaitu “Tidak Memberikan Pendapat” dari targetnya yang berupa “WTP”.</p>	<p>sektor pertanian ditunjukkan dengan realisasinya yang melebihi target, yaitu 3,37% dari target 0,52%. Kemudian, peningkatan laju pertumbuhan sektor industri juga ditunjukkan dengan realisasinya yang melebihi target, yaitu 5,07% dari target 3,68%. Peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan ditunjukkan dengan realisasinya sebesar 11,61% dari target 8,1%. Adapun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan realisasi</p>	<p>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Realisasi IPM mampu melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 72,89% dari target 72,81%. Kemudian, pada realisasi angka harapan hidup juga sudah mampu melebihi target, yaitu 71,41 tahun dari target sebesar 67,94 tahun. Akan tetapi, realisasi pada TPAK dan TPT belum bisa melebihi target, yaitu masing-masing 67,65% dan 11,53% dari</p>
--	---	--	---

		sebesar 4,19% dari target 3,375%. Realisasi rasio gini yang semakin menjauhi 1, yaitu 0,22 dari target sebesar 0,195 juga turut menjadi pendukung dalam pemerataan ekonomi.	target masing-masing yaitu 74,12% dan 7,53%.
--	--	---	--

Periode Perencanaan	:	2010-2015		
Klaster Kebijakan (Misi)		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.	Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja
Arah Kebijakan	:	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara

	<p>Kartanegara mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, penurunan tingkat pelanggaran hukum, peningkatan tertib administrasi</p>	<p>Kartanegara mampu meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, penurunan tingkat pelanggaran hukum, peningkatan tertib administrasi</p>	<p>mampu menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan nilai investasi pembangunan daerah Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM.</p>
--	---	--	---

	<p>pemerintah dan kualitas pelayanan publik, peningkatan kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas manajemen pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, dan peningkatan</p>	<p>kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit, peningkatan ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan, peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan,</p>	
--	--	---	--

	ketersediaan informasi data kabupaten.	peningkatan wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan, dan peningkatan prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	
Uraian Pencapaian :	Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah ditunjukkan dengan nilai persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tercapai sebesar 100%, Peningkatan kemampuan	Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dapat ditunjukkan dengan angka melek huruf tercapai sebesar 98,98%,	Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan jumlah nilai investasi berskala nasional PMA.

	<p>pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ditunjukkan dengan opini BPK dengan nilai wajar tanpa pengecualian, penurunan tingkat pelanggaran hukum ditunjukkan dengan tingkat pelanggaran disiplin sebesar 2%, peningkatan tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik sangat baik, peningkatan kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cakupan penanganannya</p>	<p>peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit dapat ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup sebesar 71,6% dari nilai target 68,49%, peningkatan ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan dengan meningkatnya rasio puskesmas dan jaringannya</p>	
--	--	--	--

	<p>tercapai sebesar 100%, peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat ditunjukkan dengan tingkat waktu tanggap tercapai sebesar 12jam/hari, peningkatan kualitas manajemen pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunand daerah dapat ditunjukkan dengan penilaian A pada LAKIP dan peningkatan ketersediaan informasi data kabupaten dapat</p>	<p>per satuan penduduk sebesar 0,55% dari nilai target 0,5%, peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan dapat ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat baik, penurunan angka kemiskinan dapat ditunjukkan dengan meningkatnya presentase penduduk miskin sebesar 7,99% dari nilai target 4,36%, peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan</p>	
--	--	---	--

	<p>diukur dengan tersedianya informasi data pembangunan.</p>	<p>Keluarga Sejahtera dapat ditunjukkan dengan rata-rata 2 anak per keluarga, peningkatan keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditunjukkan dengan meningkatnya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi (kelompok) sebesar 237 dari nilai target 129, peningkatan wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta</p>	
--	--	---	--

		<p>masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dapat ditunjukkan dengan cakupan fasilitas seni tercapai sebesar 10%, peningkatan prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga dapat ditunjukkan dengan tercapainya jumlah prestasi tingkat nasional dan internasional sebesar 250.</p>	
<p>Klaster Kebijakan (Misi)</p>	<p>Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis,</p>	<p>Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau</p>	<p>Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan</p>

	industri dan pariwisata.	layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.	pelestarian sumber daya alam.
Arah Kebijakan :	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan, peningkatan ketersediaan pangan,	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan kualitas sarana prasarana	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan potensi dan konservasi sumber daya hutan.

	<p>peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, peningkatan produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya, berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian dan peningkatan daya jual potensi pariwisata.</p>	<p>pendukung aktivitas ekonomi</p>	
Uraian Pencapaian :	<p>Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dapat ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan pendapatan pajak tercapai sebesar 103%; meningkatnya</p>	<p>Peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi dapat ditunjukkan dengan proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi</p>	<p>Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan/perusakan lingkungan serta pertumbuhan sektor kehutanan dapat ditunjukkan dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tercapai</p>

	<p>percentase pertumbuhan pendapatan dari retribusi sebesar 6% dari nilai target 5%; percentase pertumbuhan pendapatan tercapai sebesar 10. Peningkatan ketersediaan pangan utama tercapai sebesar 145%; peningkatan produktivitas sektor pertanian alam arti luas dapat ditunjukkan dengan kontribusi pertanian tercapai sesuai target; peningkatan produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya dapat ditunjukkan dengan produksi perikanan tercapai</p>	<p>baik sesuai irigasi dalam kondisi baik tercapai sebesar 74,55%; rumah tangga pengguna air bersih tercapai sebesar 60%; persentase rumah tangga yang menggunakan listrik tercapai sebesar 65%.</p>	<p>tercapai target; tata ruang; peningkatan potensi dan konservasi sumber daya hutan dapat ditunjukkan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercapai sebesar 7,04%.</p>	<p>sebesar 13,74%; tersedianya informasi</p>
--	---	--	---	--

	<p>sesuai target; berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian dapat ditunjukkan dengan capaian kontribusi sektor industri dan kontribusi sektor sesuai target; peningkatan daya jual potensi pariwisata dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 2222648 dari nilai target 477829.</p>		
Klaster Kebijakan (Misi)	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.		
Arah Kebijakan	Pada periode ini diharapkan		

	<p>Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p>		
Uraian Pencapaian	<p>Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan</p>		

	gender sebesar 72,22% dari nilai target 65% dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tercapai sebesar 90%.		
--	---	--	--

Periode Perencanaan	:	2016-2021		
Klaster Kebijakan (Misi)		Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten	Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan	:	Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan	Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan	Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan daya saing investasi daerah,

	daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah yang dicapai melalui peningkatan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintah, indeks persepsi korupsi, dan predikat akuntabilitas kinerja.	manajemen pendidikan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya diharapkan terjadi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup. Peningkatan daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan indikator rasio kesempatan kerja.	pendapatan asli daerah, dan kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah yang diukur melalui tingkat pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan PAD.
Uraian Pencapaian	Upaya reformasi birokrasi ditunjukkan ditunjukkan melalui meningkatnya	Peningkatan kualitas SDM yang berkompeten ditunjukkan melalui peningkatan rata-	Pertumbuhan nilai investasi baik modal asing maupun modal dalam negeri

	<p>indeks reformasi birokrasi yang meningkat dari sebesar 66,78 di awal periode menjadi 70,20 pada akhir periode sehingga predikat nya meningkat dari B (baik) menjadi BB (sangat baik). Selanjutnya, nilai AKIP pada tahun 2021 sebesar 65,6 sehingga mendapatkan predikat B (baik) menunjukkan bahwa terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>	<p>rata lama sekolah yang meningkat dari 8,68 tahun pada awal periode menjadi 9,23 tahun, maka setara dengan jenjang SMA di kelas X. Akan tetapi, meskipun meningkat capaian tersebut masih rendah dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut yang telah menunjukkan harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan dari 13,25 tahun menjadi 13,6 tahun namun masih lebih rendah daripada target. Adapun peningkatan kualitas layanan kesehatan dianalisis melalui meningkatnya</p>	<p>pada tahun 2021 mencapai 2,01 persen atau meningkat 32,24 persen dari capaian pada tahun 2016 sebesar 1,52 persen. Capaian tersebut relatif lebih tinggi daripada target yang ditetapkan sehingga menunjukkan daya tarik investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan daya saing. Sementara itu peningkatan PAD menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan dengan capaian</p>
--	---	--	---

	<p>Indeks persepsi korupsi meningkat dari awal periode sebesar 5,75 menjadi 6,37 pada akhir periode namun masih rendah daripada target yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai indeks persepsi korupsi menunjukkan tingkat korupsi yang rendah sehingga mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di Kabupaten Kutai Kartanegara membaik sepanjang periode.</p>	<p>angka harapan hidup dari sebesar 71,83 tahun pada awal periode menjadi 72,64 tahun. Capaian AHH tersebut relatif lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 71,83 tahun. Sementara itu upaya perluasan kerja belum optimal dengan capaian pada tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 5,66 persen.</p>	<p>pertumbuhan mencapai 56,97 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada awal tahun periode.</p>
<p>Klaster Kebijakan (Misi)</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan</p>	<p>Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan</p>

	Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	Menuju Daya Saing Daerah	dan Berwawasan Lingkungan
Arah Kebijakan :	<p>Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas; dengan indikator pertumbuhan sektor pertanian.</p> <p>Selanjutnya, diharapkan terjadi peningkatan potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara yang diukur melalui pertumbuhan sektor pariwisata. Terakhir, diharapkan terwujudnya pemerataan</p>	<p>Pada periode ini diharapkan terjadi penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang dicapai dengan peningkatan interkoneksi, aksesibilitas, konektivitas jaringan komunikasi dan internet, serta layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan perdesaan.</p>	<p>Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dicapai dengan peningkatan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan berkelanjutan; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta peningkatan ketersediaan sumber energi</p>

	pendapatan masyarakat melalui penurunan rasio gini.		baru dan terbarukan, dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan energi baru terbarukan.
Uraian Pencapaian :	Laju pertumbuhan non migas dan batubara menunjukkan peningkatan signifikan dari sebesar 1,73 persen pada tahun 2016 menjadi 6,11 persen menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi non migas dan batu bara. Capaian ini didukung melalui meningkatnya kontribusi sektor	Peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah dianalisis melalui peningkatan indeks ketimpangan ekonomi wilayah (indeks williamson non migas) yang mengalami penurunan capaian dari 0,33 pada awal tahun periode menjadi sebesar 0,26 pada akhir tahun periode. Penurunan tersebut	Upaya optimalisasi sumber daya alam harus dilaksanakan dengan pedoman berkelanjutan demi kelestarian lingkungan. Secara umum upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016-2021 menunjukkan perbaikan yang positif dengan

	non migas khususnya pertanian, industri pengolahan dalam total PDRB serta didukung sektor akomodasi dan makan minum. Selanjutnya, pada analisis laju pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata menunjukkan penurunan signifikan daripada capaian awal periode. Akan tetapi, analisis tidak bisa dijelaskan hanya dengan data capaian awal dan akhir periode dengan terjadinya pandemi Covid 19. Berdasarkan data selama lima tahun, pada sektor	menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam Kabupaten Kutai Kartanegara semakin rendah. Selanjutnya, cakupan aksesibilitas antar wilayah mengalami peningkatan dari sebesar 77,8 pada awal periode menjadi 82,69 pada akhir periode yang telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan cakupan aksesibilitas dengan terjadinya pandemi Covid 19. menunjukkan keterjangkauan dalam daerah yang diukur dari infrastruktur fisik	meningkatnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari sebesar 66,79 menjadi 69,57 pada akhir periode. Secara rinci, indikator status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air) mengalami kenaikan dari sebesar 49,5 pada awal periode menjadi sebesar 52,98, sedangkan status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara) mengalami peningkatan dari sebesar 76,63 pada awal periode menjadi sebesar
--	--	---	--

	<p>pertanian terjadi tren meningkat hingga tahun 2019 lalu menurun signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian mencapai 1,26 persen yang lebih rendah dari target ditetapkan dengan asumsi normal, akan tetapi capaian tersebut telah menunjukkan upaya pemulihan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang meningkat daripada tahun 2020. Sementara itu, laju PDRB pariwisata dengan capaian mencapai 2,72 persen pada tahun 2021 lebih</p>	<p>mengalami perbaikan ke arah positif.</p>	<p>91,69. Sementara itu, tutupan lahan mengalami peningkatan dari sebesar 59,99 menjadi 70,89 dan telah melampaui target yang ditetapkan.</p>
--	--	---	---

	<p>rendah daripada target yang ditetapkan. Akan tetapi, laju pertumbuhan tersebut telah menunjukkan upaya pemulihan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang meningkat daripada tahun 2020. Adapun upaya pemerataan ekonomi ditunjukkan melalui indeks gini menunjukkan peningkatan dari awal periode sebesar 0,27 menjadi 0,283. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan</p>		
--	--	--	--

	<p>pendapatan di masyarakat namun dengan capaian kurang dari 3 menunjukkan bahwa capaian tersebut tergolong kesenjangan rendah.</p>		
Klaster Kebijakan (Misi)	<p>Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembanginan serta penguatan perlindungan anak</p>		
Arah Kebijakan :	<p>Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender</p>		

<p>Uraian Pencapaian</p>	<p>Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan ditunjukkan melalui indeks pemberdayaan gender (IDG). IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada tahun 2021, capaian IDG Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 62,76. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan</p>		
------------------------------	--	--	--

	pengambilan keputusan.		
--	------------------------	--	--

Periode Perencanaan	:	2021-2026		
Klaster Kebijakan (Misi)		Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Arah Kebijakan	:	Pada periode ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani. Hal tersebut bisa dicapai apabila terjadi terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,	Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan kualitas layanan pendidikan,	Pada periode ini diharapkan terjadi peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada sektor terbarukan. Hal tersebut bisa dicapai apabila terdapat peningkatan pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah,

	<p>akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>ketahanan sosial, pelestarian kebudayaan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Kemudian, diharapkan mampu tercipta peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat dan terjadi penurunan pengangguran masyarakat. Dengan demikian, mampu tercapai pembangunan sumberdaya</p>	<p>peningkatan daya saing pariwisata daerah, perkembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing investasi daerah.</p>
--	--	---	---

		manusia yang berakhhlak mulia, unggul, dan berbudaya.	
Uraian Pencapaian :	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dengan nilai SAKIP yang realisasinya mencapai 67,4 dari target 66,89. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan peningkatan indeks persepsi anti korupsi yang targetnya 6,25 dan mampu direalisasikan sebesar 8,38. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan ketercapaian target dari indeks persepsi	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, ketahanan sosial, dan pelestarian kebudayaan ditunjukkan dengan ketercapaian pada indeks pendidikan, indeks pembangunan kebudayaan, dan indeks kesehatan yang hampir mencapai 100%. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat ditunjukkan realisasi indeks	Peningkatan daya saing pariwisata daerah ditunjukkan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dengan realisasi 3,74 dari target 2,34. Kemudian, perkembangan ekosistem ekonomi kreatif ditunjukkan dengan ketercapaian pada laju pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu 6,96 dari targt 6,11. Peningkatan daya saing investasi

	<p>kualitas pelayanan publik yaitu mencapai 9,81.</p>	<p>gini dan indeks desa membangun yang di atas target. Realisasi indeks gini yaitu berhasil turun menjadi 0,269 dan realisasi indeks desa membangun meningkatan menjadi 0,7465. Sedangkan penurunan pengangguran di masyarakat ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,14% dan peningkatan PDRB per kapita menjadi 254,5%.</p>	<p>daerah ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan investasi yang realisasinya jauh di atas target, yaitu 90,63 dari target 1,71. Kemudian, peningkatan pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah belum bisa menunjukkan ketercapaian yang baik karena realisasinya hanya 1,91 dari target 5,69.</p>
<p>Klaster Kebijakan (Misi)</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar</p>	<p>Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang</p>	

	dan Konektivitas Antar Wilayah	Berwawasan Lingkungan	
Arah Kebijakan :	Pada periode ini Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan terjadi peningkatan pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah yang mampu dicapai melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.	Pada periode ini Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan terjadi peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana daerah.	
Uraian Pencapaian :	Peningkatan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase rumah layak huni dan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah belum bisa sepenuhnya tercapai. Hal tersebut	

	<p>cakupan layanan air bersih. Realisasi persentase rumah layak huni mampu mencapai 93,39% dari target 90,35%. Kemudian, pada cakupan layanan air bersih belum bisa memenuhi target karena realisasinya masih 76,67% dari target 89,32%. Selanjutnya, pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum bisa sepenuhnya dicapai karena indeks aksesibilitas wilayah realisasinya masih 75,65% dari target 84,18%.</p>	<p>disebabkan karena realisasinya belum mampu mencapai target. Indeks kualitas lingkungan hidup memiliki realisasi sebesar 71,77% dari target 73,14%, sedangkan untuk indeks risiko bencana, realisasinya 120,96 dari target 108,55.</p>	
--	---	--	--

LAMPIRAN III

Formulir 6. Evaluasi Pencapaian RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan		
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Periode/Visi/Misi													
Visi 1 : Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten yang Baik dan Bersih Berlandaskan Asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, Maju, Mandiri dan Sejahtera													
Misi 1 : Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum	Tujuan :	Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang baik, bersih, bertanggung jawab (professional), taat asas (peraturan dan perundangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi.											
	sasaran	Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).	Opini BPK terhadap LKPD Kukar	WDP	WTP	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)	0	0	-Belum memadainya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan aspek peritusahan dan pelaporan keuangan daerah -Cepatnya perubahan yang terjadi dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah sehingga seringkali daerah kurang responsif dalam mengantisipasi perubahan tersebut -Tidakadanya kesamaan struktur organisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan yang mengakibatkan terputusnya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahanpahaman dalam pelaksanaan dan pembagian tugas		Sangat Rendah		
Misi 2 : Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi	Tujuan :	Tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, diiringi dengan upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (<i>nonrenewable resources</i>) kepada sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>).											
	sasaran	Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan sektor pertanian	n/a	0,52	3,37	648,08	100	Meningkatnya laju degradasi lingkungan yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan	Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian	Sangat Tinggi		
Misi 3 : Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi	Tujuan :	Menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera	Laju pertumbuhan sektor industri	n/a	3,68	5,07	137,77	100		Penguatan sektor ekonomi informal, khususnya UMKM dan koperasi	Sangat Tinggi		
			Laju pertumbuhan sektor perdagangan	n/a	8,1	11,61	143,33	100			Sangat Tinggi		
			Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	n/a	3,375	4,19	124,15	100			Sangat Tinggi		
			Rasio Gini	0,29	0,195	0,22	87,18	87,18	Kapasitas SDM yang masih rendah.	Program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah.	Tinggi		
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,27	72,81	72,89	100,11	100	- Masih rendahnya tingkat pendidikan, tergambar pada RLS dan HLS di Kukar - Kondisi Geografis yang luas, menyebabkan akses anak usia sekolah dalam mendapat pendidikan formal kurang, - Masih banyak anak usia sekolah yang memiliki bekerja diarpada bersekolah, khususnya di daerah pedalaman yang banyak daerah pertambangan dan perkebunan	- keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan kesehatan dalam mendukung capaian derajat kesehatan, pembangunan Puskesmas, pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten, serta promosi PHBS - kontribusi PDRB sektor migas meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan efek pada peningkatan pendapatan masyarakat	Sangat Tinggi		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	n/a	74,12	67,65	91,27	91,27	-Perlu adanya pemberian bantuan dana modal usaha bagi para pencari kerja atau tenaga pengajar yang telah dilatih agar dapat mengembangkan usaha mandiri mereka	-Pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Sangat Tinggi		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	n/a	7,53	11,53	46,88	46,88			Sangat Rendah		
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,5	67,94	71,41	105,11	100	Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat	- Penerapan pola hidup sehat yang membaik dan Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Sangat Tinggi		
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2005-2010								82,53					
Periode/Visi/Misi								Predikat Kinerja	Tinggi				
Visi 2 : Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan													



Periodeasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1: Meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance	Tujuan	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan bertanggungjawab, akuntabel serta pelayanan umum yang didukung teknologi informasi										
	Sasaran	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	n.a	100	100	100	100	-	- Adanya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, program pelayanan administrasi perkantoran, serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Sangat Tinggi	
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak Memberikan Pendapat	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100	100	-	- Adanya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah - Meningkatnya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	Sangat Tinggi	
		Menurunnya tingkat pelanggaran hukum	Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	9	2	2	100	100	-	- Adanya program peningkatan disiplin aparatur	Sangat Tinggi	
		Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100	100	-	- Memperbaiki sistem pelayanan dengan menetapkan Standar Pelayanan. - Peningkatan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan - Peningkatan Jumlah dan Penataan penempatan personil Pelaksana	Sangat Tinggi	
		Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Cakupan penanganan Kamtibmas (%)	100	100	100	100	100	-	- Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah serta peningkatan kepercayaan satu sama lain dalam menjaga ketertiban dan keamanan.	Sangat Tinggi	
		Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam peranggulangan bencana	Tingkat waktu tanggap (jam)	12	12	12	100	100	-	- Peningkatan kesadaran dan pengetahuan, baik pemerintah maupun masyarakat terkait dengan mitigasi bencana.	Sangat Tinggi	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Tujuan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan sejahera dengan peran serta dan produktivitas tinggi serta bertaqwa kepada Tuhan YME dan berdasarkan Pancasila	Penilaian LAKIP	D	A	A	100	100	-	Adanya berbagai program, yaitu: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Sangat Tinggi	
	Sasaran	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	96,87	98,98	98,98	100	100	- Kesadaran penduduk pada beberapa wilayah yang lebih menganggap bahwa bekerja lebih penting daripada pendidikan	- Adanya upaya untuk memberantas buta aksara dengan mengalokasikan anggaran keaksaraan fungsional untuk melaksanakan kejar paket A,B dan C	Sangat Tinggi	
		Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,93	68,49	71,6	104,5408089	100	- Kondisi geografis daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat sulit untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat	- Penerapan pola hidup sehat yang membaik dan Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Sangat Tinggi	



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
									Faktor Penghambat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Misi 3 : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan	Rasio Puskesmas dan jaringannya per satuan penduduk	0,3	0,5	0,55	110	100	-	- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan kesehatan	n.a	Baik	Baik	100	100	-	Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara berkala, pemberian pemahaman terhadap pelaksanaan SOP, peningkatan layanan penyakit yang berkaitan dengan program global (MDG's), pelaksanaan pelayanan kebidanan yang berkualitas.	Sangat Tinggi	
	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	8,73	4,36	7,99	16,74	16,74311927	- Banyak penduduk yang mengalami perburuan pendapatan akibat dari dampak ekonomi global dan nasional	- Pemberian bantuan sosial bagi para penduduk miskin yang membutuhkan	Sangat Rendah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100	100	- sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan KB masih kurang, alat kontrasepsi yang dijual belikan secara bebas dan bukan ditempat pelayanan kesehatan	- Mengajak dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam penggerakan program KB - memberdayakan kader kesehatan, promosi dan pendataan - melakukan dan meningkatkan pelayanan KB paska persalinan serta penjaringan akseptor KB	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	LPN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi (kelompok)	0	129	237	183,7209302	100	-		Sangat Tinggi	
	Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	5	10	10	100	100	-	-Pemeliharaan benda situs cagar budaya - Penyelenggaraan festival seni budaya daerah - Adanya program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Jumlah prestasi tingkat nasional dan internasional	150	250	250	100	100	-	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	Sangat Tinggi	
Misi 4 : Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja	Tujuan	1. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.									
	Sasaran	Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional:						- Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara.		
			- PMDN (Rp)	1.978.668.350.306	1.118.376.266.274	10.071.768.790.256	900,5706839	100	- Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban penyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKP) secara periodik kepada BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara		
			- PMA (US\$)	68.559.952	9.492.182.216	16.369.109.905	172,448332	100	- Adanya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi		
Misi 5 : Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan		2. Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan							- Adanya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Sangat Tinggi	
	Sasaran	Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,53	3,79	10,22	-69,65699208	0	- Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam berwirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 148 peserta, berupa Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Sekam Sharing, Pelatihan Pengurutan Usaha dan Homesharing - Workshop penumbuhan minat wirausaha dan pelatihan pengurutan usaha ditujukan untuk wirausaha muda pemula, serta melakukan pendampingan melalui klinik WPM (Wirausaha Pemuda Mandiri) dalam mencari solusi dan peluang usaha yang dihadapi pemuda.	Sangat Tinggi	



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	61,27	97,73	97,73	100	100	-	- Adanya program peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kcl menengah (Identifikasi UKM Baru/Wira usaha baru) melalui koperasi - Terbangunnya usaha koperasi disesuaikan tingkat kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi, barang dan jasa, untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota.	Sangat Tinggi
Misi 4 : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata	Tujuan	Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan yang didukung daya saing perdagangan, industri dan pariwisata daerah									
	Sasaran	Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan	Persentase pertumbuhan pendapatan (%)							- Menggali potensi pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang dan Perda yang berlaku.	
			- Pajak	-30	103	103	100	100	-	- Pendataan pajak dan obyek retribusi	Sangat Tinggi
			- Retribusi	-60	5	6	120	100	-	- Penyediaan surat ketetapan pajak Daerah dan	Sangat Tinggi
			- Bagi hasil	50	10	10	100	100	-	- Ketersediaan (Produksi) pangan utama cukup baik dan stabil	Sangat Tinggi
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (%)	134	145	145	100	100	-	- Distribusi / akses pangan utama yang baik - Kebijakan Pemerintah daerah dalam menjaga dan mendukung disparitas harga	Sangat Tinggi
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (dlm juta rp)	7649525	13098234	10.757.614	82,13026581	82,13026581	-	Hampir 36 produksi padi Kalimantan Timur dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain tanaman padi, ubi kayu juga merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan oleh penduduk Kutai Kartanegara.	Tinggi
		Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya	Produksi perikanan (ton)	120303,9	210535,3	210535,3	100	100	-	Terdapat komoditi andalan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi yang sudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara antara lain udang windu, kepiting, ikan patin, ikan bettu, serta berbagai macam jenis ikan tawar lainnya.	Sangat Tinggi
		Berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (dlm juta rp)	1260109	2707133	3.458.151	127,7421833	100	-	Meningkatnya produksi kelapa sawit serta industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi Kutai Kartanegara.	Sangat Tinggi
			- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (dlm juta rp)	2823709	6957452	3.361.189	48,31063297	48,31063297	- Kualitas produk lokal yang belum mampu bersaing di pasar global maupun nasional apalagi dibandingkan dengan produk-produk impor. Upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan mutu produk. - Masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang pasar. Solusi yang tempuh melalui pengembangan jejaring kerja		Sangat Rendah
		Meningkatnya daya jual potensi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	397532	477829	2222648	465,1555263	100		Kabupaten Kutai Kartanegara selain terkenal dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, juga memiliki beragam daya tarik wisata yang unik dan menarik baik itu daya tarik wisata alam, budaya, maupun buatan.	Sangat Tinggi
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas	Tujuan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.									



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan								
								Faktor Penghambat										
								(9)	(10)									
Periode/Visi/Misi																		
Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN																		
Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat																		
	Tujuan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks Reformasi birokrasi	66,78	n/a	70,2												
	Sasaran	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	n/a	81,00	65,6	80,99	80,99	- Belum optimalnya pelaksanaan dan pengintegrasian penggunaan aplikasi SIMRAL dengan aplikasi internal di Kabupaten Kutai Kartanegara - Masih terdapat ketidak sesaran pada dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah - Pencapaian kinerja perangkat daerah tidak seluruhnya berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah - Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja belum optimal, baik dalam proses pengintegrasian sistem maupun sebagai sarana monitoring dan evaluasi, serta belum adanya pelaksanaan pemberian rewards and punishment atas capaian kinerja - Kurang optimalnya Diklat LKJIP yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada karena kendala Covid-19 sehingga terlaksana secara daring sehingga terkendala teknis.	- Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sudah optimal dalam proses monitoring dan evaluasi terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pengumpulan data kinerja - Dalam upaya peningkatan SDM yang menangani SAKIP telah dilakukan melalui Diklat LKJIP dengan bekerjasama dengan pihak Universitas Gadjah Mada	Tinggi							
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Korupsi	5,75	6,90	6,37	92,32	92,32	- Peran program pengendalian korupsi yang memerlukan banyak dukungan dan koordinasi dari banyak pemangku kepentingan baik di internal dan eksternal pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara - Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder masih rendah sehingga kesadaran anti korupsi juga masih rendah	- Adanya identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah - Adanya pernyataan dan penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah - Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah - Adanya monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Sangat Tinggi							
		Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)	n/a	8,75	9,18	104,91	100	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dan belum meratakan kualitas jaringan di setiap wilayah menjadi penghambat dalam penerapan pelayanan publik secara online - Belum meratakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan layanan online - Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan - Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan	- Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan) - Adanya inovasi berupa pelayanan online dalam upaya menghadirkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat kepada masyarakat selama pandemi Covid-19	Sangat Tinggi							
Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan :	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlaq mulia	IPM	72,19	n/a	73,75	0											
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8,68	9,41	9,23	98,09	98,09	- Kesadaran penduduk di wilayah tertentu yang lebih mementingkan bekerja dan cari uang (pada daerah-daerah perkebunan sawit dan kampung nelayan) dari pada bersekolah - Belum akurasi data pendidikan penduduk pada dokumen kependudukan (Kartu keluarga tidak pernah diupdate riwayat pendidikannya) - Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara sulit dijangkau	- Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa - Berdirinya sanggar kegiatan belajar (SKB) baru di 8 kecamatan sebagai upaya pengentasan putus sekolah - Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah (SMA) - Adanya beasiswa bagi mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia - Semakin terbukanya akses jalan sehingga memudahkan warga untuk menempuh pendidikan	Sangat Tinggi Sangat Tinggi							
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,6	71,83	72,64	101,13	100	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat sulit untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat	- Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat, serta penerapan pola hidup sehat membuat peningkatan status kesehatan masyarakat - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, berupa sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah sakit sampai dengan puskesmas yang tersebar di kecamatan, kelurahan dan desa	Sangat Tinggi							



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Menurunkan jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	n/a	4,96	5,66	85,89	85,89	- Pandemi COVID-19, yang berimbas melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah dan menurunnya volume produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja. - Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang dimulai oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendapatan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun juga dari pendatang.	- Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam berwirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 148 peserta, berupa Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Sekam Sharing, Pelatihan Pengutamaan Usaha dan Homesharing - Workshop penumbuhan minat wirausaha dan pelatihan pengutamaan usaha dilakukan untuk wirausaha muda pemuda, serta melakukan pendampingan melalui klinik WPM (Wirausaha Pemuda Mandiri) dalam mencari solusi dan peluang usaha yang dihadapi pemuda.	Tinggi	
	Meningkatnya pengertian kemiskinan	Percentase Tingkat Kemiskinan	7,63	6,63	7,99	79,49	79,49	- Penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. - Program-program kurang mengarah pada akar permasalahan kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara terlebih saat ini perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami goncangan oleh karena menurunnya produksi komoditas migas dan batu bara.	- Pemberian bantuan sosial bagi para penduduk miskin - Pemberian bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas	Tinggi	
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Daerah	Tujuan :	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Derajat Otonomi Fiskal	6,08%	n/a	11,34%					
	Sasaran	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA & PMDN)	1,52	1,98	2,01	101,52	100	- Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai bagian dari ibu Kota Negara Baru - Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan - Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi - Regulasi dibidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya merupakan faktor pendorong iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam memberikan izin usaha oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dalam mendukung kemudahan berinvestasi di Kab. Kutai Kartanegara	Sangat Tinggi	
	Tujuan :	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	LPE (Non Migas dan Batu Bara)	-15,69	10,61	56,97	536,95	100	- Melakukan Pemetaan dan pengaturan sumber-sumber penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah - Membangun interaksi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan pendapatan daerah - Membangun sarana prasarana yang berorientasi kepada pendapatan daerah - Melakukan pengembangan sistem administrasi pajak daerah, melalui inovasi pajak online "Si Pajol Batijak".	Sangat Tinggi	
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan Transformasi	Tujuan :										



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
Struktur Ekonomi Daerah	Sasaran	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2,34	7,16	1,06	14,80	14,80	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar, namun belum mendapat perhatian yang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh masih rendah, harus ada fokus apa yang akan pemerintah lakukan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian, dengan melibatkan semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat - Potensi sektor pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, masih merupakan magnet terbesar jika dibandingkan dengan sektor pertanian. - Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan. - Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tuan dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian. - Belum adanya sistem irigasi yang terintegrasi dengan baik 	- Adanya Sungai Mahakam yang menjadi salah satu pemasok air untuk pertanian	Sangat Rendah
		Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,65	7,97	2,72	34,13	34	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berimpas pada sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur yang mulai digalakkan untuk mendukung aksesibilitas wilayah dan sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa - Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan akan menjadi salah satu destinasi wisata penduduk IKN 	Sangat Rendah
		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,27	0,269	0,283	94,80	94,80	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi besarnya pendapatan terutama untuk kelompok menengah kebawah yang tidak memiliki penghasilan tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase pengeluaran/ daya beli kelompok penduduk 40% terbawah. - Kenaikan angka kemiskinan diupayakan dikendalikan dengan adanya program perlindungan sosial pemerintah yang digulirkan selama masa pandemi Covid-19. 	Sangat Tinggi
Misi 5: Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah	Tujuan :	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,33		0,26					
		Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	77,8	77	82,69	107,39	100	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat. 	Sangat Tinggi
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Tujuan :	Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,79		69,67					
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran air sungai	49,5	56,78	52,98	93,31	93,31	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya aktivitas manusia di sekitar sungai dari buangan kotoran manusia/ hewan, limbah rumah tangga misalnya pembuangan sampah organik dan pembuangan sisa sabun dan limbah rumah tangga lainnya - pengawasan terhadap pola perilaku masyarakat yang bermukim di banaran sungai masih sangat sulit dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menganggulangi pencemaran air sungai 	Sangat Tinggi
			Status pencemaran udara	76,63	95,48	91,69	96,03	96,03	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran hutan yang sering terjadi pada musim kemarau 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLAH) dan Penanaman Pohon 	Sangat Tinggi
			Tutupan Lahan	59,99	59,99	70,89	118,17	100	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program-program peneingkatan kualitas lingkungan hidup, seperti diantaranya program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) - Memperbaiknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, seperti taman kota, taman keanekaragaman hayati, dan penanaman tanaman perindang jalan yang efektif menyerap polutan udara 	Sangat Tinggi
Misi 7 : Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta pengutamaan perlindungan anak	Tujuan :	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	77,88%		80,09%					
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	63,9	62,76	98,22	98,22	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang efisiennya penggunaan sumber daya anggaran untuk mewujudkan program-program pembedayaan gender, seperti program pengaruh utama gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program penemuan hak anak (PHA), serta program perlindungan khusus anak. - Adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam menyusun strategi dengan memerhatikan kesetaraan gender 	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2016-2021								86,99			
Predikat Kinerja								Tinggi			



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Periode/Visi-2021-2026											
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA											
Misi 1 :Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Tujuan : Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani										
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	66,35	66,89	67,4	100,76	100			- Dukungan Kebijakan penyedian dana untuk realisasi anggaran - Komitmen dari seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Perbaikan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil - Semakin meningkatnya kapabilitas APIP	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,17	6,25	8,38	134,08	100			- Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah; - Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah; - Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan - Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,07	8,85	9,81	110,85	100			- Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan). - Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan. - Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.	Sangat Tinggi
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlik Mulia, Unggul dan Berbudaya	Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing										
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Keterhanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,685	0,69	0,687	99,13	99,13	- Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan. - Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.	- Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa - Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Sangat Tinggi	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	n.a	50,00	47,42	94,84	94,84	Penurunan minat terhadap kebudayaan asli setempat.	- Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional. - Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif. - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi. - Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasaranra penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.	Sangat Tinggi		



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Capaian Kinerja RPJMD	Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	99,86	99,86	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat	- Perbaikan sarana prasarana Kesehatan dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. - Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. - Menambahkan indikator kinerja tambahan terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kabupaten, dan indikator kinerja tambahan di bawah koordinasi kecamatan	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	79,12	79	79,8	101,01	100	- Kurang efisiennya penggunaan sumber daya anggaran untuk mewujudkan program-program pembangunan gender, seperti program pengurusan utama gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program penemuan hak anak (PHA), serta program perlindungan khusus anak. - Adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja	- Adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam menyusun strategi dengan memerhatikan kesetaraan gender	n/a	
Tujuan :	Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat										
Sasaran	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,283	0,29	0,269	107,24	100	- Kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. - Pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. - Distribusi kekayaan yang tidak merata.	- Pengembangan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan - Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi di luar pantai	Sangat Tinggi	
		Indeks Desa Membangun	0,713	0,705	0,7465	105,89	100	- Sebagian kecil kepala desa yang enggan meningkat/berubah status desanya dikarenakan ada ketakutan pengurangan anggaran desa. - Kondisi geografik Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas juga mempengaruhi pemerataan pembangunan seperti masih minimnya akses internet, layanan Kesehatan bagi desa-desa tertinggal. - Kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang Teknis Pengisian Formulir kuisisioner penilaian indeks desa membangun terutama terkait dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki desa.	- Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa dan Kabupaten - Adanya kesadaran pemerintah desa terkait prestasi kinerja pemerintah desa dalam pencapaian status desa. - Adanya reward yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi desa	Sangat Tinggi	
	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,66	4,94	4,14	116,19	100	- Pandemi COVID-19, yang berimbas melemahkan kondisi perekonomian nasional dan daerah dan menurunnya volumen produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutuskan hubungan kerja. - Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang dimiliki oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendatangan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun pula dari pendatang.	- Pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan workshop dengan metode full cost, menjadi faktor yang menarik antusias minat peserta pelatihan. - Kerjasama yang dibangun dengan balaik-balai pelatihan yang terakreditasi dan instruktur berpengalaman. - Biaya pelatihan berbasis kompetensi relatif cukup tinggi, sehingga belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan.	Sangat Tinggi	
		PDRB Per Kapita	241,7	187,21	254,5	135,94	100	- Peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir. - Pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya	Berkembangnya berbagai sektor yang berperan dalam peningkatan PDRB per kapita.	Sangat Tinggi	
Misi 3 : MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tujuan :	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan									
		Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,02	5,69	1,91	33,57	33,57	- Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan. - Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tua dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.	Produksi sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Sangat Rendah
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	2,72	2,34	3,74	159,83	100	Pandemi Covid-19.	Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata.	Sangat Tinggi



Periode/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,23	6,11	6,96	113,91	100		- Ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki - Terbukanya kesempatan bagi mereka untuk berkreasi didukung dengan kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudahan dalam akses komunikasi - Perkembangan media sosial	Sangat Tinggi
	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	1,71	90,63	5.300,00	100		- Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai salah satu bagian dari Ibu Kota Negara baru, dengan bentangan daratan dan perairan yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam, serta alur Sungai Mahakam yang menjadi poros ekonomi. - Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan. - Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi. - Regulasi di bidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya. - Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menerbitkan izin usaha oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dalam mendukung kemudahan berinvestasi di Kab. Kutai Kartanegara.	Sangat Tinggi
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Tujuan :	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah								
		Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	70,85	89,32	76,67	85,84	85,84	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian sasaran ini, terlalu luasnya wilayah menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni.	Adanya program RBPK Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berpengaruh terhadap capaian sasaran meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih.
			Presentase Rumah Layak Huni	92,76	90,35	93,39	103,36	100	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian sasaran ini, terlalu luasnya wilayah menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni.	Adanya program RBPK Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berpengaruh terhadap capaian sasaran meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih.
		Meningkatnya aksesibilitas dan koneksiivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	73,75	84,18	75,65	89,87	89,87	Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas perenangan jalan umum secara umum mengalami peningkatan.
MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Tujuan :	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan								
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,76	73,14	71,77	98,13	98,13	- Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air - Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperlukan lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 - Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter Fecal Coliform masih diatas batu mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik. - Belum adanya IPAL Domestik Komunal di Wilayah Perkotaan (Tenggarong). - Belum adanya pengelahan air limbah dari usaha kecil.	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	119,16	108,55	120,96	88,57	88,57	- Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana. - Lemahnya upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada Renstra dan atau rencana kerja (Renja) OPD terkait.	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana.
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2021-2026								86,23		
Predikat Kinerja								Tinggi		





**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Kutai Kartanegara**